



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2138 TAHUN 2024

TENTANG

## **PENETAPAN DATA PRIORITAS DAN DATA PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses, dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 679 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, data prioritas dan data pendukung merupakan hasil penentuan daftar data berdasarkan hasil koordinasi Forum Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Data Prioritas dan Data Pendukung Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Data Prioritas dan Data Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KETIGA : Data Prioritas dan Data Pendukung sebagaimana dimaksud diktum kesatu akan dilakukan pembaruan setiap saat melalui **satudata.polmankab.go.id** sesuai keadaan sebenarnya oleh masing-masing Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 19 Maret 2024

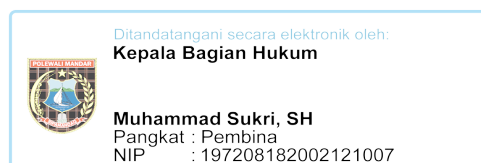
**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 2138 TAHUN 2024  
 TAHUN : 19 MARET 2024

**DATA SEKTORAL DAN DATA PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Pendidikan dan Pengajaran</b>							
1	Persentase APK SD/MI	√		√				T
2	Persentase APM SD/MI	√		√				T
3	Persentase APK SMP/MTs	√		√				T
4	Persentase APM SMP/MTs	√		√				T
5	Persentase angka putus sekolah SD/MI	√						T
6	Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	√						T
7	Persentase sekolah (SD) yang terakreditasi	√						T
8	Persentase sekolah (SMP) yang terakreditasi	√						T
9	Persentase sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal (SD dan SMP)	√						T
10	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang digunakan di sekolah (SD dan SMP)	√						T
11	Rasio Siswa dengan Kelas SMP						√	T
12	Rasio Siswa dengan Sekolah Menengah Pertama						√	T
13	Rasio Siswa dengan Rombel SMP						√	T
14	Rasio Siswa dengan Kelas SD						√	T
15	Rasio Siswa dengan Sekolah Dasar						√	T
16	Rasio Siswa dengan Rombel SD						√	T
17	Jumlah SD Negeri dan Swasta						√	T
18	Jumlah SMP Negeri & Swasta						√	T
19	Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta						√	T
20	Jumlah Siswa SD Negeri dan Swasta						√	T
21	Jumlah SD Terakreditasi		√	√				T
22	Jumlah SMP Yang Terakreditasi		√	√				T
23	Jumlah Peserta Asesment Nasional SMP Negeri dan Swasta						√	T
24	Jumlah SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Buku						√	T
25	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SD						√	T
26	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP						√	T
27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		√					T
28	Jumlah Lulusan SD/MI Sederajat				√			T
29	Jumlah Siswa Baru SMP/MTs Sederajat				√			T
30	Jumlah Peserta Asement Nasional SD Negeri dan Swasta						√	T
31	Jumlah Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemenuhan Buku						√	T
32	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		√					T
33	Jumlah Prestasi Lomba-Lomba yang diikuti Siswa						√	T
34	Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama				√			T
35	Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama				√			T
36	Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama				√			T
37	Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama				√			T





No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
125	Jumlah LKP (Lembaga Kursus dan pelatihan)							√	T
126	Jumlah Warga Belajar PKBM							√	T
127	Jumlah Warga Belajar LKP							√	T
128	Jumlah Tutor Pendidikan Masyarakat							√	T
129	Jumlah Lembaga Dikmas Ter-Akreditasi							√	T
130	Jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah) Usia 7-18 Tahun							√	T
131	Jumlah Sarana & prasarana PAUD yang tersedia							√	T
132	Jumlah Sarana & prasarana Pendidikan Masyarakat							√	T
133	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi		√	√					T
134	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		√	√					T
135	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan		√	√					T
136	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD		√						T
137	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		√						T
138	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah yang berwenang		√						T
139	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi		√						T
140	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		√						T
141	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		√						T
142	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan		√						T
143	Jumlah pendidik (Tutor) pada satuan pendidikan kesetaraan		√						T
144	Jumlah pendidik (Tutor) pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		√						T
145	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1		√						T
146	Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				√				
147	Jumlah Guru (Pendidik) Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				√				
148	Jumlah Murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				√				
149	Jumlah Sarana & prasarana Pendidikan Masyarakat							√	T
<b>4</b>	<b>Bidang Sarana &amp; Prasarana</b>								
150	Persentase sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	√							T
151	Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	√							T
152	Jumlah Sanitasi SMP							√	T
153	Jumlah Rumah Ibadah SMP							√	T
154	Jumlah Rumah Ibadah SMP Yang Direhab								
155	Jumlah SMP dengan Akses Fasilitas Tertentu (Komputer, Internet)							√	T
156	Jumlah SMP dengan Lahan Milik Pemerintah							√	T
157	Jumlah SMP dengan Lahan Milik Non-Pemerintah							√	T
158	Jumlah Sekolah SMP/MTs dalam Kondisi Baik					√			T
159	Persentase sarana dan prasarana sekolah dasar dalam kondisi baik	√							T
160	Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar dalam kondisi baik	√							T
161	Jumlah Sanitasi SD							√	T
162	Jumlah SD dengan Akses Fasilitas Tertentu (Komputer, Internet)							√	T
163	Jumlah SD dengan Lahan milik Pemerintah							√	T
164	Jumlah SD dengan Lahan Milik Non-Pemerintah							√	T
165	Jumlah Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik					√			T

No.	Daftar Data*)		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
	166	Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik						√	
	167	Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik						√	
	168	Persentase sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik						√	
<b>5</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>								
	169	Persentase Budaya daerah yang aktif dikembangkan	√						T
	170	Presentase situs Cagar Budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan	√						T
	171	Persentase situs cagar budaya yang lestari	√						T
	172	Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan	√						T
	173	Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi	√						T
	174	Persentase kesenian tradisional yang lestari	√						T
	175	Persentase kesenian daerah yang aktif dan berkembang	√						T
	176	Persentase benda pusaka serta alat-alat tradisi dan kesenian yang dilestarikan	√						T
	177	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				√			T
	178	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi				√			T
	179	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni				√			T
	180	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah				√			T
	181	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)				√			T
	182	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni				√			T
	183	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				√			T
	184	Jumlah Benda Situs Cagar Budaya						√	T
	185	Jumlah Penjaga Makam						√	T
	186	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang telah terdaftar dan ditetapkan						√	T
	187	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		√					T
	188	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		√					T
	189	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		√					T
	190	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		√					T
	191	Jumlah cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) yang diregister		√					T
	192	Jumlah Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		√					T
	193	Jumlah tim pendaftaran cagar budaya		√					T
	194	Jumlah tim ahli cagar budaya provinsi		√					T
	195	Jumlah kegiatan fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		√					T
	196	Jumlah pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman		√					T
	197	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota		√					T
	198	Jumlah sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman yang disediakan		√					T
	199	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan					√		
	200	Jumlah Sanggar / Komunitas Seni					√	√	T
	201	Jumlah Alat Musik Tradisional						√	T
	202	Jumlah Kuliner Tradisional						√	T
	203	Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat				√			T
	204	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya					√		T
	205	Jumlah Organisasi/kelompok kesenian/kebudayaan yang dibina					√		T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
206	Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya					√		T
<b>DINAS KESEHATAN</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Kesehatan Masyarakat</b>							
1	Indeks Kepuasan Layanan RS	√						T
2	Angka Harapan Hidup	√						T
3	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)					√		T
4	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup				√			T
5	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup				√			T
6	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun				√			T
7	Prevalensi Stunting	√						T
8	Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi	√						T
9	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)				√			T
10	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (%)				√			T
11	Capaian Pelayanan KB Aktif						√	B
12	Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan dan Dukun						√	B
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani					√		T
14	Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan					√		T
15	Persentase puskesmas dengan status akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna)	√						T
16	Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	√						T
17	Angka Kematian Ibu	√		√				T
18	Angka Kematian Bayi	√		√		√		T
19	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (poskesdes, Pustu, Puskesmas, Alat Kesehatan, Puskesmas Keliling)	√						T
20	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	√						T
21	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/ Kabupaten sesuai standar	√						T
22	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	√						B
23	Persentase UKBM Yang Aktif	√						B
24	Persentase Kader Kesehatan dan lintas sektor yang aktif dan mandiri	√						T
25	Persentase Desa/Kelurahan STBM	√						Tr
26	Persentase Sanitasi Tempat-Tempat Umum						√	Tr
27	Persentase OPD Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga						√	Tr
28	Jumlah Penduduk usia >60 tahun yang memperoleh skrining/pemeriksaan kesehatan sesuai standar	√						T
29	Jumlah Puskesmas Santun Lansia	√						T
30	Jumlah Penduduk Lansia yang memperoleh pembinaan kemandirian	√						T
32	Jumlah Capaian Pelayanan K1						√	B
33	Jumlah Capaian Pelayanan K4						√	B
34	Jumlah Capaian Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan						√	B
35	Jumlah Capaian Pelayanan Nifas Oleh Tenaga Kesehatan						√	B
36	Jumlah Capaian Pelayanan Komplikasi Obstetri						√	B
41	Jumlah Lahir Hidup					√		
42	Jumlah Kematian Bayi					√	√	B
43	Jumlah Neonatal Pertama			√				B
44	Jumlah Neonatal Lengkap			√				B
45	Jumlah Penjaringan Anak Sekolah SD						√	T
46	Jumlah Penjaringan Anak Sekolah SMP						√	T
47	Jumlah Penjaringan Anak Sekolah SMA						√	T
48	Jumlah Balita Gizi Buruk			√		√		B



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
49	Jumlah Balita Gizi Kurang					√		
50	Jumlah Balita Dibawah Garis Merah (BGM)					√		B
51	Jumlah Balita Stunting			√				B
53	Jumlah Balita					√		B
54	Jumlah Balita Ditimbang					√		B
55	Jumlah Ibu Hamil Anemia Per Puskesmas			√				B
56	Jumlah Kelahiran Hidup Per Puskesmas			√				B
57	Jumlah Kelahiran Mati Per Puskesmas			√				B
58	Jumlah Bayi Usia 0-6 Bl Yang Mendapat ASI Eksklusif			√				B
61	Jumlah Lansia Tingkat Kemandirian A,B,C						√	B
62	Jumlah Posyandu Lansia yang Aktif						√	B
63	Jumlah Tenaga yang Mendapatkan Pelatihan Lansia dan Geriatri						√	B
67	Jumlah Kasus Bunuh Diri			√				T
69	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan ibu hamil		√					T
70	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		√					T
71	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan bayi baru lahir		√					T
72	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi pelayanan kesehatan balita sesuai standar		√					T
73	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		√					T
74	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		√					T
75	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		√					T
76	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		√					T
78	Jumlah Posyandu				√	√		T
80	Jumlah Posyandu Aktif						√	
82	Jumlah kelurahan/desa siaga					√		B
84	Jumlah Kelurahan/Desa Siaga Aktif					√	√	B
86	Jumlah Strata Posyandu						√	B
88	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan						√	B
90	Jumlah Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)						√	Tr
92	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sarana Air Bersih						√	Tr
94	Jumlah Keluarga Akses Jamban Sehat						√	Tr
96	Jumlah Pengawasan sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM)						√	Tr
98	Jumlah Rumah Tangga Akses Sarana Tempat Sampah						√	Tr
100	Jumlah Rumah Tangga Akses Sarana SPAL						√	Tr
102	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)				√			
104	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)				√			
106	Persentase makanan memenuhi syarat				√			
108	Usia Harapan Hidup Perjenis Kelamin						√	
110	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan)						√	
112	Jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0- 59 bulan)						√	
114	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu perjenis kelamin:						√	
116	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas						√	
118	Jumlah kelahiran hidup (ibu yang hamil, bersalin, dan nifas yang melahirkan hidup)						√	
120	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan						√	
122	Jumlah ibu bersalin						√	



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
175	Jumlah Kunjungan Pasien							√	B
176	Jumlah Fasilitas Kesehatan							√	T
177	Jumlah Rumah Sakit Umum				√	√			T
178	Jumlah Rumah Sakit Khusus				√	√			T
179	Jumlah Rumah Sakit/Rumah Bersalin				√				T
180	Jumlah Puskesmas				√	√			T
181	Jumlah Klinik/Balai Kesehatan				√				T
182	Jumlah Polindes				√				T
183	Jumlah Poliklinik					√			T
184	Jumlah Kelompok Asman TOGA dan Akpresur)							√	T
185	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional							√	B
186	Jumlah Pelayanan Kesehatan SPA							√	B
187	Jumlah Penyehat Tradisional							√	B
<b>4</b>	<b>Bidang Sumber Daya Kesehatan</b>								
188	Persentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang sesuai standar	√							T
189	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	√							T
190	Persentase Pemeriksaan Post Market Produk Industri Rumah Tangga Pangan	√							T
191	Persentase Apotek, Toko Obat dan optikal, UMOT yang memiliki izin	√							T
192	Persentase industri Rumah Tangga Produk Makanan dan Minuman yang memiliki izin	√							T
193	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang memiliki izin	√							T
194	Persentase tenaga kesehatan, masyarakat dan Lintas Sektor yang mendapatkan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	√							T
195	Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi (Tenaga Medis, Tenaga Para Medis)	√							T
196	Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ber STR (Tenaga Medis)	√							T
197	Persentase obat memenuhi syarat				√				T
198	Jumlah Distribusi Obat Kabupaten							√	B
199	Jumlah Kefarmasian/ Penggunaan Obat Rasional (POP)							√	B
200	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Swasta							√	T
201	Jumlah Rekomendasi / Izin yang dikeluarkan / diterbitkan							√	T
202	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		√						T
203	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		√						T
204	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		√						T
205	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		√						T
206	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		√						T
207	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar untuk orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		√						T
208	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar untuk warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		√						T
209	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		√						T
210	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Milletus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		√						T
211	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
212	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		√					T
213	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		√					T
214	Jumlah Tenaga Kesehatan				√			T
215	Jumlah Kasus Penyakit				√			T
216	Jumlah Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Ahli, Dokter PTT, Bidan, Bidan PTT, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya)					√		T
217	Jumlah Dokter yang Dibutuhkan						√	
218	Jumlah Perawat yang Dibutuhkan						√	
219	Jumlah Bidan yang Dibutuhkan						√	
220	Jumlah Tenaga Medis yang Dibutuhkan						√	
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Sumber Daya Air</b>							
1	Indeks Infrastruktur	√						T
2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	√						T
3	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik					√		T
4	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		√					T
5	Persentase panjang jaringan irigasi skunder kondisi baik		√					T
6	Persentase panjang jaringan irigasi tersier kondisi baik		√					T
7	Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten						√	T
8	Jumlah jaringan irigasi kondisi baik	√						T
9	Jumlah bendung yang telah ditingkatkan	√						T
10	Panjang saluran irigasi yang telah direhabilitasi	√						T
11	Jumlah bendung irigasi yang berfungsi dengan baik	√				√		T
12	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik					√		T
13	Panjang keseluruhan saluran irigasi					√		T
14	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun				√			T
15	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi				√			T
16	Panjang Jaringan Irigasi yang Dipelihara						√	T
17	Jumlah laporan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi	√						T
18	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		√					T
19	Panjang sungai kewenangan kabupaten						√	T
20	Panjang sungai yang terpelihara	√						T
21	Panjang sungai kewenangan daerah yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya				√			T
22	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		√					T
23	Panjang garis pantai						√	T
24	Jumlah pengaman pantai pada wilayah sungai kondisi baik	√						T
25	Panjang bangunan perkuatan tebing yang terbangun	√						T
26	Jumlah Pintu Air dalam kondisi baik					√		
27	Jumlah Pintu Air yang dibutuhkan						√	T
28	Jumlah Pintu Air yang dipelihara						√	T
29	Jumlah Rata-Rata Debit Bendung						√	B
30	Jumlah laporan polisi khusus sumber daya air	√						T
31	Jumlah unit pengelola teknis daerah pengelola sumber daya air (UPTD PSDA)	√						T
32	Jumlah Dokumen Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		√					T



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
76	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		√						T
77	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		√						T
78	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		√						T
79	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja		√	√					T
80	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		√						T
81	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan		√						T
82	Jumlah prasarana pengolahan lumpur tinja yang disediakan		√						T
83	Jumlah rumah yang tersambung ke IPALD yang disediakan		√						T
84	Jumlah jasa penyedotan lumpur tinja yang disediakan		√						T
85	Jumlah bangunan gedung kantor kondisi baik	√							T
86	Jumlah Unit bangunan gedung kantor yang terbangun	√							T
87	Jumlah Rehabilitasi Gedung							√	T
88	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung yang ditetapkan (Ada/Tidak)		√						T
89	Jumlah Dokumen Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung yang ditetapkan (Ada/Tidak)		√						T
90	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		√						T
91	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		√						T
92	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		√						T
93	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat		√						T
94	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal				√				T
95	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd), SPAM berbasis Masyarakat				√				T
96	Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)				√				T
97	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)				√				T
98	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)				√				T
99	Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT)				√				T
100	Jumlah truk tinja (unit)				√				T
101	Jumlah penduduk berakses air minum layak					√			T
<b>4</b>	<b>Bidang Bina Konstruksi</b>								
102	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terampil	√	√						T
103	Jumlah tenaga jasa konstruksi mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi/ Pelatihan		√						T
104	Indeks kepuasan pelayanan jasa konstruksi	√							T
105	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	√	√						T
106	Jumlah jenis sistem informasi jasa konstruksi	√							T
107	Jumlah penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		√						T
108	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		√						T
109	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		√						T
110	Jumlah ketersediaan data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		√						T
111	Jumlah ketersediaan data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
112	Jumlah ketersediaan data dan profil OPD suburusan jasa konstruksi kabupaten/kota		√						T
113	Jumlah ketersediaan data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		√						T
114	Jumlah ketersediaan data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		√						T
115	Jumlah ketersediaan data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		√						T
116	Jumlah ketersediaan data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		√						T
117	Jumlah Pengadaan Alat Lab. Bahan Bangunan Konstruksi							√	T
<b>5</b>	<b>Bidang Penataan Ruang</b>								
118	Jumlah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang telah ditetapkan	√							T
119	Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan	√							T
120	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kebijakan Penataan Ruang	√							T
121	Jumlah PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting								T
122	Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	√							T
123	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	√							T
124	Jumlah pelanggaran tata ruang yang terselesaikan	√							T
125	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung							√	T
126	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota				√				T
127	Presentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang				√				T
128	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota				√				T
129	Jumlah tempat ibadah					√			T
130	Jumlah Bangunan					√			T
131	Jumlah Bangunan ber-PBG					√			T
<b>DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Perumahan</b>								
1	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik	√							T
2	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	√							T
3	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	√							T
4	Persentase rumah yang terbangun dan atau direhabilitasi	√							T
5	Jumlah PSU yang terbangun di Perumahan Formal	√	√						T
6	Jumlah hunian Rusunawa	√							T
7	Jumlah Perumahan Formal bersubsidi yang memiliki PSU yang memadai	√							T
8	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU	√							T
9	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		√						T
10	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum (Perumahan)		√						T
11	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan (Perumahan)		√						T
12	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) (Perumahan)		√						T
13	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		√						T
14	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU (Perumahan)		√						T
15	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	Usulan OPD	
16	Jumlah pengembang yang terregistrasi		√						T
17	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		√						T
18	Jumlah Rumah Layak Huni	√							T
19	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun	√	√						T
20	Jumlah rumah yang terbangun/direhabilitasi bagi korban bencana dan relokasi	√							T
21	Jumlah Pengembangan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni		√						T
22	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		√						T
23	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√						T
24	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		√						T
25	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		√						T
26	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√						T
27	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√						T
28	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√						T
29	Jumlah unit Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH )		√						T
30	Jumlah rumah yang tidak dihuni (Perumahan)		√						T
31	Jumlah rumah pembangunan baru		√						T
32	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni				√				T
33	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah				√				T
34	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni				√				T
35	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas				√				T
36	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar				√				T
37	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Tertangani							√	T
<b>2</b>	<b>Bidang Permukiman</b>								
38	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Permukiman (Drainase, Rabat Beton, MCK, Talud, dll)								T
39	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		√						T
40	Luasan Kawasan Kumuh	√	√						T
41	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	√							T
42	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman	√							T
43	Luas kawasan kumuh yang tertangani	√							T
44	Luas Permukiman Kumuh					√			
45	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu				√	√			T
46	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota				√				T
<b>3</b>	<b>Bidang Pertanahan</b>								
47	Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	√							T
48	Luas Kebutuhan Tanah yang direncanakan untuk pembangunan	√							T
49	Luas Tanah yang disiapkan untuk pembangunan	√							T
50	Luas tanah yang terdata	√							T
51	Luas Tanah yang bersertifikat	√							T
52	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		√						T
53	Jumlah SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		√						T
54	Jumlah SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		√						T
55	Jumlah Dokumen Izin membuka tanah		√						T
56	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		√						T



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
57	Jumlah Sengketa Tanah yang terselesaikan	√						T
58	Jumlah Usulan Pensertifikatan HPI						√	T
59	Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Reforma Agraria dalam rangka Mengurangi Ketimpangan Kepemilikan Tanah				√			T
60	Jumlah Daerah yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria				√			T
61	Jumlah Daerah yang Menetapkan Perda terkait Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi dengan Lampiran Delineasi Peta Tanah Adat				√			T
62	Jumlah sertifikat Hak Milik					√		T
63	Jumlah sertifikat Hak Guna Pakai					√		T
64	Jumlah sertifikat hak guna bangunan					√		T
65	Konflik tanah yang ditindaklanjuti					√		T
66	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)				√			
67	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan				√			
68	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)				√			
69	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha				√			
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan</b>							
1	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti	√						T
2	Jumlah perda yang disosialisasikan	√						T
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		√		√			T
4	Jumlah potensi Pelanggaran perda dan Perbup yang terawasi	√						T
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada				√			T
6	Jumlah Penanganan kasus Pelanggaran Perda yang disidik dan ditindaklanjuti	√						B
7	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati					√	√	B
8	Jumlah Kasus Pelanggaran Yang Ditindak Lanjuti PPNS						√	B
9	Jumlah Pemenuhan PPNS di Satpol PP sesuai Rasio				√			T
10	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA					√		T
<b>2</b>	<b>Bidang Ketertiban Umum &amp; Ketentraman Masyarakat</b>							
11	Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	√						T
12	Jumlah gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan baik	√						B
13	Jumlah potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dalam Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri	√						T
14	Jumlah Pelaksanaan Patroli gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	√						B
15	Jumlah Penindakan atas gangguan Keamanan dan Ketertiban dan Ketertiban Umum	√						B
16	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa/Kerusuhan Massa						√	B
17	Jumlah Penertiban Pelanggaran Perda/Perbup/Kebijakan Bupati dan Pelanggaran Ketertiban Umum						√	B
18	Jumlah Operasi Pekat Satuan Polisi Pamong Praja						√	B
19	Jumlah Pemantauan Ketertiban Masyarakat & Pengamanan Wilayah						√	B
20	Jumlah Demonstrasi Bidang Politik					√		B
21	Jumlah Demonstrasi Kasus Pemogokan Kerja					√		B
22	Jumlah Pengaduan Masyarakat						√	B
23	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dengan Petugas Trantib Lainnya	23					√	B
24	Jumlah Hasil kordinasi dengan Instansi Terkait Perihal Pelaksanaan Kegiatan Trantibum						√	B
25	Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		√				√	B
<b>3</b>	<b>Bidang Sumber Daya Aparatur</b>							
26	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi Dasar dan Teknis	√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
	27	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Penigkatan Kapasitas SDM Satpol PP	√						T
	28	Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS dan Peningkatan Kapasitas PPNS	√						T
	29	Jumlah Petugas Polisi Pamong Praja						√	T
	30	Jumlah Petugas Polisi Pamong Praja Yang Telah mengikuti Pelatihan Dasar						√	T
	31	Jumlah Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja						√	T
	32	Jumlah Petugas Polisi Pamong Praja Yang Telah mengikuti Bimbingan Teknis Fungsional						√	T
<b>4</b>	<b>Bidang Perlindungan Masyarakat</b>								
	33	Persentase kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	√						T
	34	jumlah kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	√						T
	35	Jumlah peserta pelatihan Linmas	√						T
	36	Jumlah dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat						√	T
<b>5</b>	<b>UPTD Damkar</b>								
	37	Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran	√						T
	38	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		√					T
	39	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	√						T
	40	Jumlah kebakaran yang tertangani sesuai standar prosedur penanganan kebakaran	√						B
	41	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelidung diri	√						T
	42	Jumlah ketersediaan pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		√					T
	43	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		√					T
	44	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		√					T
	45	Jumlah Petugas Damkar						√	T
	46	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		√					T
	47	Jumlah peserta pelatihan Pemadam Kebakaran	√						T
	48	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		√					T
	49	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran				√			T
	50	Jumlah Kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit				√			T
	51	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK				√			T
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>								
	1	Indeks Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana	√						T
	2	Indeks Risiko Bencana		√	√				T
	3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		√					T
	4	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		√					T
	5	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		√					T
	6	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		√					T
	7	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		√					T
	8	Persentase warga negara yang ikut pelatihan		√					T
	9	Jumlah Desa Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi rawan bencana	√						T
	10	Jumlah Jenis Layanan Siaga Bencana	√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
11	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	√						T
12	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Resiko Bencana Daerah			√				T
13	Jumlah daerah rawan bencana yang dilengkapi papan informasi rawan bencana	√						T
14	Jumlah dokumen rencana kontinjensi berdasarkan jenis ancaman	√						T
15	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				√			T
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				√			T
2	<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>							
17	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		√					T
18	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		√					T
19	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		√					T
20	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		√					T
21	Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana	√						S
22	Jumlah kejadian bencana yang teridentifikasi dan terverifikasi	√				√		S
23	Jumlah Kejadian Bencana							S
24	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana						√	T
25	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana			√				S
26	Jumlah rumah yang terkena bencana alam (Non Kebakaran)		√					S
27	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		√					S
28	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√					S
29	Jumlah Peralatan Kebencanaan Logistik						√	S
30	Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana yang dikembangkan	√						T
31	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				√			T
32	Jumlah Korban Manusia yang diakibatkan Bencana Alam				√			T
33	Jumlah Kerusakan Rumah yang diakibatkan Bencana Alam				√			T
3	<b>Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi</b>							
34	Jumlah Survey Rehabilitasi Pasca Bencana						√	S
35	Jumlah Survey Rekonstruksi Pasca Bencana						√	S
36	Jumlah Kerugian Ekonomi Akibat Bencana			√				S
37	Jumlah Pascabencana yang tertangani	√						T
38	Jumlah petugas terlatih Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) pada kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi				√			T
<b>DINAS SOSIAL</b>								
1	<b>Bidang Rehabilitasi Sosial</b>							
1	Persentase PMKS yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	√						T
2	Jumlah PMKS diLUAR PANTI yang ditangani dalam Pelayanan Sosial	√						T
3	Jumlah PMKS LUAR PANTI yang diberi keterampilan	√						T
4	Jumlah PMKS LUAR PANTI yang mendapatkan Penyediaan Permakanan	√						T
5	Jumlah PMKS LUAR PANTI yang memperoleh keterampilan	√						T
6	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)					√		T
7	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)					√		T
8	Jumlah PMKS tertangani (jiwa)					√		T
9	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)					√		T
10	Jumlah Anak Luar LKSA/PANTI ASUHAN						√	T
11	Jumlah Anak yang Berhadapan Hukum (ABH)						√	B
12	Jumlah Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)						√	B
13	Jumlah Anak Terlantar						√	T
14	Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT)						√	T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
15	Jumlah Calon Orang Tua Angkat (COTA)							√	T
16	Jumlah Lansia							√	T
17	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas							√	T
18	Jumlah Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di Luar Panti		√						T
19	Jumlah Bantuan Pemakanan Bagi Anak Terlantar di Luar Panti		√						T
20	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik			√					T
21	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)			√					T
22	Jumlah Disabilitas Netra			√					T
23	Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	√							T
24	Jumlah Bekas Korban Pengguna NAPZA	√							T
25	Jumlah Waria							√	T
26	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi							√	T
27	Jumlah PSK(Pekerja Sosial Komersial)							√	T
28	Jumlah Pasca Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)							√	T
29	Jumlah Disabilitas Penerima Program Rehabilitasi Sosial							√	T
30	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		√						T
31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		√						T
32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		√						T
33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		√						T
34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		√						T
35	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		√						T
36	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		√						T
37	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		√						T
38	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		√						T
39	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		√						T
40	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		√						T
41	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		√						T
42	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		√						T
<b>2</b>	<b>Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>								
43	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	√							T
44	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Uraian Per Desa)				√				T
45	Jumlah RUTA dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah yang valid	√							T
46	Jumlah data Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial yang valid	√							T
47	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial penerima bantuan sosial	√							T
48	Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			√					T
49	Jumlah Tenaga Relawan (TAGANA)							√	T
50	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
51	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		√					T
52	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		√					T
53	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		√					T
54	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		√					T
55	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan		√					T
56	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		√					T
57	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		√					T
58	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		√					T
59	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		√					T
60	Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH)			√				B
61	Jumlah penerima PBI JKN Pusat			√				B
62	Jumlah penerima PBI Jamkes Daerah (Rekomendasi)			√				B
63	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki		√					T
64	Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan				√			
<b>3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin</b>							
65	Persentase Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan	√						T
66	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yg diberdayakan	√						T
67	Jumlah KK KAT yang mendapat fasilitas Pemberdayaan Sosial	√						T
68	Jumlah Anak Putus sekolah yang dilatih keterampilan usaha	√						T
69	Jumlah KUBE (APBD)						√	Tr
70	Jumlah KUBE (APBN)						√	Tr
71	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		√					T
72	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		√					T
73	Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Usaha Kesejahteraan Sosial	√						T
74	Jumlah Kelompok dan Individu yang diberdayakan	√						T
75	Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dikelola	√						T
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>							
1	Jumlah Informasi Kinerja Lingkungan hidup (DIKPLHD), KLHS, D3TLH yang disusun	√						T
2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, DPLH, AMDAL/DELH)	√						T
3	Jumlah Rekomendasi UKL/UPL						√	T
4	Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		√					T
5	Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lingkungan Yang Ditangani						√	T
6	Jumlah Mitra/Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup						√	T
7	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang mendapatkan pembinaan	√						T
8	Jumlah Aparat Yang Ditingkatkan Kompetensinya dalam Pengelolaan Lingkungan						√	
9	Jumlah titik pantau adipura dan lokasi proklim	√						T
10	Jumlah Kantor/Sekolah yang mendapatkan Pembinaan dan Penilaian	√						T
11	Jumlah Bank Sampah yang mendapat pembinaan	√						T
12	Jumlah Rumah Kompos Yang Dibina						√	T
13	Jumlah TPS 3R Yang Dibina						√	T
14	Jumlah Pengepul dan Lapak Yang Dibina						√	T
15	Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup						√	T
16	Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung				√			T
17	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup				√			T
	..... Dst, dapat ditambahkan jika diperlukan dan data tersedia							
<b>2</b>	<b>Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran</b>							
18	Tingkat Pencemaran	√						Tr

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	Usulan OPD	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	√			√				T
20	Indeks kualitas air (IKA)		√						T
21	Indeks Kualitas Udara (IKU)		√						T
22	PPLHD Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya							√	T
23	Persentase titik pantau tidak melampaui ambang batas baku mutu pencemaran	√							T
24	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca				√				
25	Jumlah Laporan hasil Pra Asesment Laboratorium	√							T
26	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan Penghasil Limbah Berbahaya	√							T
27	Jumlah Jenis usaha /Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang terbina	√							S
28	Jumlah jenis usaha /Kegiatan yang mendapat izin mengelola limbah dan limbah B3							√	S
29	Jumlah permohonan berkas Izin Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang telah terverifikasi	√							B
30	Jumlah pencemaran air, Udara, dan Tanah dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tertangani	√							B
31	Jumlah titik kualitas air yang dipantau dan teruji			√					B
32	Jumlah Titik Kualitas Udara yang dipantau dan teruji							√	B
33	Jumlah Titik Kualitas Tanah yang dipantau dan teruji							√	B
34	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan terkait pemeliharaan lingkungan	√							Tr
35	Jumlah Lokasi Proklamasi Yang Terbina							√	T
36	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca							√	T
37	Indeks tutupan hutan (ITH)		√						T
38	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		√						T
39	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		√						T
40	Pemulihan ekosistem pada Tahura		√						T
41	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		√						T
42	Rehabilitasi Hutan dan Lahan				√				T
	..... Dst, dapat ditambahkan jika diperlukan dan data tersedia								
<b>3</b>	<b>Bidang Kebersihan dan Pertamanan</b>								
43	Persentase sampah yang terkelola	√							T
44	Persentase timbulan sampah yang terkelola	√							T
45	Persentase Pengurangan Sampah	√							T
46	Persentase Penanganan Sampah	√		√					T
47	Persentase Ruang Terbuka Hijau	√							T
48	Capaian Pengelolaan sampah kabupaten		√						T
49	Jumlah Petugas Kebersihan							√	T
50	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan							√	T
51	Jumlah Kecamatan Yang Terlayani Pengangkutan Sampah							√	T
52	Volume Produksi Sampah		√						B
53	Jumlah Timbulan Sampah Perkotaan yang Tertangani	√	√						B
54	Jumlah Timbulan Sampah Yang Daur Ulang							√	B
55	Jumlah sampah yang berhasil dikurangi melalui pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah	√							B
56	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terkelola dengan baik	√				√			T
57	Jumlah Taman yang terkelola	√							T
58	Jumlah Tenaga Petugas Pemeliharaan & Penataan Taman							√	T
59	Jumlah Armada Kebersihan siap beroperasi	√							T
60	Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah (TPS-3R)							√	T
61	Jumlah Sampah Yang Dikelola TPS 3R								
62	Jumlah Bank Sampah							√	T
63	Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (JUTA TON)				√				T
64	Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah (Juta ton)				√				T

No.	Daftar Data*)		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
			RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
	65	Jumlah sampah yang tertangani					√		T
	66	Jumlah timbulan sampah					√		T
	67	Luas areal pelayanan					√		T
<b>4</b>	<b>UPTD TPA Sampah Binuang</b>								
	68	Volume Sampah Yang Masuk TPA						√	B
	69	jumlah Jenis Sarana TPA						√	B
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>								
	1	Persentase kepemilikan KTP elektronik	√				√		S
	2	Persentase kepemilikan kartu keluarga	√				√		S
	3	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	√						B
	4	Jumlah Penerbitan KTP Elektronik	√						B
	5	Jumlah Penerbitan SKP WNI	√						B
	6	Jumlah penduduk pada Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2)					√	√	S
	7	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan						√	S
	8	Jumlah Perekaman KTP-el per Kecamatan						√	B
	9	Jumlah Kepemilikan KTP-el per Kecamatan						√	S
	10	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan						√	S
	11	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan							S
	12	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendaftaran penduduk	√						B
	13	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk	√						B
	14	Jumlah Layanan Perubahan Status dan Kewarganegaraan						√	B
<b>2</b>	<b>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</b>								
	15	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun	√		√	√	√		T
	16	Jumlah Akta Kelahiran	√		√				B
	17	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Usia (0-18) Tahun			√				S
	18	Jumlah Kelahiran dan Kepemilikan Akte Kelahiran (AK) Per kecamatan			√				B
	19	Jumlah Penerbitan Akte Kelahiran Umur 0-5 Tahun						√	B
	20	Jumlah Akta Perkawinan	√	√					B
	21	Jumlah Akta Perceraian	√	√					B
	22	Jumlah peserta sidang Isbath Nikah	√						B
	23	Jumlah Akta Pengakuan Anak	√						B
	24	Jumlah Akta Pengesahan Anak	√						B
	25	Jumlah Akta Kematian	√	√					B
	26	Jumlah Perubahan Nama						√	B
	27	Jumlah Layanan Status Anak						√	B
	28	Peningkatan cakupan Akta Kematian yang diterbitkan							
	29	Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran.							
<b>3</b>	<b>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>								
	28	Jumlah NIK yang terupdate	√						B
	30	Jumlah Laporan data kependudukan dan pemanfaatan	√						T
	31	Jumlah Penyajian data kependudukan		√					B
	32	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	√						T
	33	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK						√	T
<b>4</b>	<b>Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>								
	34	Jumlah Perjanjian Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Lembaga Pengguna						√	T
	35	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data kependudukan						√	T
	36	Jumlah Inovasi Pelayanan						√	T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa</b>							
1	Persentase desa yang Berkembang	√						T
2	Persentase desa yang Maju	√						T
3	Persentase desa yang Mandiri	√						T
4	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif					√		T
5	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	√						T
6	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	√						T
7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		√					T
8	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa	√						T
9	Jumlah Desa Status Sangat Tertinggal			√				T
10	Jumlah Desa Status Tertinggal			√	√			T
11	Jumlah Desa Berkembang				√			T
12	Jumlah Desa Maju							T
13	Jumlah Desa Mandiri			√	√			T
14	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan kemasyarakatan					√		T
15	Jumlah desa yang menyelenggarakan musrenbang desa tepat waktu	√						T
16	Jumlah desa yang difasilitasi pemetaan potensi kawasan perdesaan	√						T
17	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		√					T
18	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi status perkembangan desa (IDM)	√						T
19	Jumlah Alokasi Dana Desa Berdasarkan Bidang Kegiatan						√	T
20	Jumlah Kelompok Binaan PKK						√	T
21	Jumlah Posyandu Aktif						√	T
22	Jumlah Karang Taruna						√	T
23	Jumlah RT dan RW							
24	Jumlah PAUD di Desa							
<b>2</b>	<b>Bidang Pemerintahan Desa</b>							
25	Persentase desa dengan status kurang berkembang	√						T
26	Persentase desa dengan status berkembang	√						T
27	Persentase desa dengan status Cepat Berkembang	√						T
28	Persentase Desa yang melakukan kerjasama Desa	√						T
29	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	√						T
30	Jumlah Desa Kurang Berkembang						√	T
31	Jumlah Desa Berkembang				√			T
32	Jumlah Desa Cepat Berkembang						√	T
33	Jumlah desa yang memiliki dokumen perencanaan	√						T
34	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama Desa	√	√					T
35	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	√						T
36	jumlah desa yang menyusun dokumen profil desa	√						T
37	jumlah desa menyusun evaluasi perkembangan desa	√						T
38	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		√					T
39	Jumlah Desa yang desanya tertib administrasipengelolaan aset desa				√			T
40	Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuanPermendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota				√			T
41	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan aset	√						T



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
42	Jumlah peraturan desa yang memenuhi kaidah penyusunan	√						T
43	Jumlah peraturan desa dievaluasi	√						T
44	Jumlah pengawasan pemerintahan desa	√						T
45	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemdes						√	T
46	Jumlah Pagu Alokasi Dana Desa (APBD)						√	T
47	Jumlah Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)						√	T
<b>3</b>	<b>Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG</b>							
48	Persentase BUMDesa yang Berkembang	√						T
49	Persentase BUMDesa yang berkembang Maju	√						T
50	Persentase BUMDesa yang berkembang Mandiri	√						T
51	Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	√						T
52	Penyertaan Modal Bumdes							
53	Pendapatan Asli Desa (PAD) Bumdes							
54	Jumlah BUMDES yang dibina dan diawasi	√						T
55	Jumlah Bumdes						√	T
56	Jenis Usaha Bumdes						√	T
57	Jumlah Status Bumdes							T
58	Jumlah Status Bumdes Yang Berbadan Hukum							T
59	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes				√			T
60	Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya				√			T
61	Jumlah Revitalisasi Bumdes Berkembang				√			T
62	Jumlah Revitalisasi Bumdes Maju				√			T
63	Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Berkembang				√			T
64	Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Maju				√			T
65	Jumlah Desa yang dibangun sarana dan Prasarannya untuk mendukung destinasi wisata				√			T
66	Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa				√			T
67	Jumlah Desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	√						T
68	Jumlah bahan peralatan/hasil expo Teknologi Tepat Guna (TTG)					√		T
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &amp; PERLINDUNGAN ANAK</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</b>							
1	Persentase peserta KB aktif	√	√					T
2	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		√					T
3	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		√					T
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		√					T
5	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		√					T
6	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		√					T
7	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		√					T
8	Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (Provinsi)						√	T
9	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun						√	T
10	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		√					T
11	Jumlah kebijakan yang terpadu	√						T
12	Jumlah sekolah siaga kependudukan	√						T
13	Jumlah pemangku kepentingan yang memperoleh pemahaman Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai peringatan Dini Dampak Kependudukan	√						T
14	Banyaknya Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga						√	T
15	Jumlah Pelayanan Kontrasepsi (Jumlah Peserta KB Baru)			√				B
16	Jumlah Bidan Praktek Mandiri						√	B

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	Usulan OPD	
17	Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) menurut Kecamatan							√	T
18	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Aktif Menurut Kontrasepsi Yang Dipakai			√					B
19	Jumlah Pengendalian Lapangan							√	B
20	Jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perda-kan		√						T
21	Jumlah Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		√	√					T
22	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		√						T
23	Jumlah Kampung KB	√							T
24	Jumlah Rumah data kependudukan yang terbentuk	√							T
25	Jumlah Data dan informasi keluarga yang tersedia	√							T
26	Jumlah Kegiatan kampung KB							√	B
27	Perkembangan Kampung KB / Per kecamatan							√	B
28	Laju Pertumbuhan Penduduk						√		
29	Jumlah Migrasi Masuk Perjenis Kelamin						√		
30	Jumlah Migrasi Keluar Perjenis Kelamin						√		
31	Jumlah Kasus Pernikahan Anak/Pernikahan Dini						√		
<b>2</b>	<b>Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>								
32	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)				√				T
33	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berencana (KB)				√				T
34	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)				√				T
35	Jumlah Kader Kelompok KB yang meningkat kapasitasnya dalam Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	√							T
36	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mencapai target penyuluhan KB	√							T
37	Jumlah ALKON yang terdistribusi	√							T
38	Jumlah kelompok KB yang memperoleh pemahaman Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	√							T
39	Jumlah Layanan Keluarga Berencana							√	B
40	Jumlah Ormas yang aktif dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	√							T
41	Jumlah Keluarga yang telah terbina terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	√							T
42	Jumlah PKB/ PLKB yang aktif dalam layanan program KKBPK	√							T
43	Jumlah Akseptor KB yang terbina pasca pelayanan	√							T
44	Jumlah Alat Kontrasepsi yang dimanfaatkan terhadap PUS	√							T
45	Jumlah Kader Poktan yang terlatih	√							T
46	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).							√	T
47	Jumlah Kelompok UPPKS	√							T
48	Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja Berbasis Sekolah							√	T
49	Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja Berbasis Masyarakat							√	T
50	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK				√				T
51	Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre				√				T
52	Jumlah peserta KB aktif						√		
53	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 Tahun						√		
54	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19						√		
55	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 Tahun						√		
56	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani						√		
57	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP						√		
58	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi						√		
59	Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB						√		
60	Jumlah rumah tangga Lansia						√		
61	Jumlah Lansia yang secara rutin diperiksa kesehatannya oleh petugas PUSKESMAS						√		



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
100	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		√					T
101	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		√					T
102	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		√					T
103	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		√					T
104	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				√			
105	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.				√			
106	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				√			
107	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan				√			
108	Indeks Perlindungan Anak				√			
109	Proporsi Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun				√			
110	Persentase Balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak				√			
111	Indeks Perlindungan Khusus Anak				√			
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Pengembangan Perhubungan</b>							
1	Persentase kualitas sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	√						T
2	Jumlah Rencana Induk Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	√						T
3	Jumlah Rencana FS Bandara dan Rencana Pembangunan Sarana Fasilitas Keselamatan Jalan	√						T
4	Jumlah Prasarana Transportasi dan Penyeberangan						√	T
5	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas						√	T
6	Jumlah Papan Nama Jalan						√	T
7	Jumlah Dermaga dan Pelabuhan			√				T
8	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell						√	T
9	Jumlah Traffic Light						√	T
10	Jumlah Warning Light						√	T
11	Jumlah Portal Jalan						√	T
12	Jumlah Guardrail						√	T
13	Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik	√						T
14	Jumlah Perlengkapan Jalan	√						T
15	Jumlah Perengkapan Jalan Yang berfungsi baik	√						T
16	Jumlah Sarana Prasarana Perhubungan Yang Dipelihara						√	T
	..... Dst, dapat ditambahkan jika diperlukan dan data tersedia							
<b>2</b>	<b>Bidang Lalu Lintas</b>							
17	Persentase titik rawan kecelakaan yang aman	√						T
18	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		√					T
19	Jumlah Titik Lokasi Parkir yang Tertib	√						T
20	Jumlah fasilitas parkir dalam kondisi baik	√						T
21	Jumlah manajemen rekayasa lalu lintas	√						T
22	Jumlah wilayah Rekayasa Lalu Lintas						√	T
23	Jumlah Rekomendasi Andalalin						√	T
24	Jumlah Lokasi Tertib lalu lintas	√						T
25	Jumlah titik kemacetan dan rawan kecelakaan yang terkendali	√						T
26	Jumlah Titik Rawan Kecelakaan						√	T
27	Jumlah Pengamanan lalu Lintas						√	T
28	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas						√	B
	..... Dst, dapat ditambahkan jika diperlukan dan data tersedia							
<b>3</b>	<b>Bidang Angkutan</b>							

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
29	Persentase angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	√						T
30	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C		√					T
31	Jumlah Fasilitas Terminal yang tersedia dalam kondisi baik	√						T
32	Jumlah Angkutan Tidak Dalam Trayek						√	T
33	Jumlah Angkutan Penyeberangan						√	T
34	Jumlah Angkutan Umum (angkutan Orang)						√	T
35	Jumlah Angkutan Umum (angkutan Barang)						√	T
36	Jumlah Kartu Kontrol Pengawasan Trayek						√	T
37	Jumlah dokumen Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		√					T
38	Jumlah angkutan Umum yang di tertibkan	√						T
39	Jumlah Angkutan Umum Keluar Masuk Terminal	√						T
40	Jumlah Kendaraan yang telah Uji KIR	√	√					B
41	Jumlah Uji KIR angkutan Umum					√		B
42	Jumlah Kendaraan Roda Empat					√		T
43	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		√					T
44	Jumlah Kendaraan Bermotor				√			T
45	Jumlah penumpang Keluar Masuk Angkutan dan Penumpang di Terminal Tipe C						√	B
46	Jumlah penumpang angkutan umum					√		T
47	Jumlah Kartu Pengawasan Yang Diterbitkan	√				√		T
48	Jumlah kendaraan yang memiliki kartu pengawasan	√						T
49	Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional				√			
50	Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan				√			
51	Level Keselamatan Transportasi				√			
<b>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>							
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015		√					T
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		√					T
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		√					T
4	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		√					T
5	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	√						T
6	Jumlah Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif	√						T
7	Jumlah perangkat daerah yang telah didukung layanan informasi Website, PPID, dan Media Sosial	√						T
8	Jumlah Anggota PPID Yang Telah Mengikuti Pelatihan dan telah Lulus Sertifikasi			√				T
9	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	√						T
10	Jumlah ketersediaan sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		√					T
11	Jumlah Layanan Informasi Publik						√	B
12	Jumlah Stasiun Radio/TV Lokal dan Nasional					√	√	T
13	Jumlah Surat Kabar Terbitan Lokal dan Nasional					√	√	T
14	Jumlah Pemilik Usaha TV Kabel di Kabupaten Polman						√	T
15	Jumlah Jenis Media Penyebaran Informasi Publik Penyelenggaraan Pemda						√	T
16	Jumlah Kegiatan Bupati yang Terpublikasi						√	B



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
51	Jumlah Domain dan Sub Domain yang terlayani							√	T
52	Jumlah Area Yang Telah Dilakukan Pengamanan Informasi							√	T
53	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		√						T
54	Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia	√							T
55	Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani Pusat Data	√	√						T
56	Jumlah Menara Telekomunikasi							√	T
57	Jumlah Jaringan Telepon Seluler					√		√	T
58	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner					√		√	T
59	Jumlah Wilayah Desa Blankspot di Kabupaten Polewali Mandar							√	T
60	Jumlah Wilayah 3T Yang Terkoneksi Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet							√	T
61	Presentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan				√				
62	Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah				√				
<b>3</b>	<b>Bidang Statistik</b>								
63	Persentase Data sektoral yang valid	√							T
64	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik		√						T
65	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik		√						T
66	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				√				T
67	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah				√				T
68	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		√						T
69	Persentase data yang dapat berbagi pakai		√						T
70	Jumlah jenis Data Sektoral yang telah dimutakhirkan	√							B
71	Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikumpulkan							√	B
72	Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikelola							√	B
73	Jumlah Data Sektoral Yang Dipublikasikan							√	B
74	Jumlah Elemen Data Sektoral yang dilengkapi standar data dan metadata	√							T
75	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun				√				T
76	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		√						T
77	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		√						T
78	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		√						T
79	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		√						T
80	Jumlah Aplikasi Polman Satu Data Online	√							T
81	Jumlah Jenis Buku Statistik yang Tersedia					√		√	T
82	Tersedianya buku profil daerah							√	T
83	Jumlah dinas yang mendapatkan rekomendasi statistik				√				T
84	Jumlah dinas yang menindaklanjuti rekomendasi				√				T
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>								
1	Jumlah Investor	√							T
2	Nilai realisasi investasi daerah	√							T
3	Jumlah Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang sesuai standar prosedur	√							T
4	Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Nama Perusahaan							√	B
5	Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Lokasi Proyek							√	B
6	Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Sektor							√	B
7	Jumlah Sektor Unggulan yang Dipromosikan	√							Tr
8	Data Potensi Investasi Menurut Sektor							√	B
9	Jumlah Kantor Bank dan ATM			√					T





No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
	52	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan OSS							B
	53	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial OSS							B
	54	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Kesatuan Bangsa dan Politik OSS							B
	55	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS							B
<b>4</b>	<b>Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B</b>								
	56	Jumlah Perizinan Sektor B yang ditinjau						√	B
	57	Jumlah Tindak Lanjut Pengelolaan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Sektor A Yang Telah Memenuhi Syarat						√	B
	58	Jumlah Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Sektor B						√	B
	59	Jumlah Izin yang belum di tetapkan Sektor B							B
	60	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Kelautan dan Perikanan Non OSS							B
	61	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Pertanian Non OSS							B
	62	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Non OSS							B
	63	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Perindustrian Non OSS							B
	64	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS							B
	65	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Pekerjaan Umum an Perumahan Non OSS							B
	66	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Transportasi Non OSS							B
	67	Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Kesehatan, Obat dan Makanan Non OSS							B
	68	Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Pariwisata Non OSS							B
	69	Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Ketenagakerjaan Non OSS							B
	70	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Non OSS							B
	71	Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS							B
	72	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Kesatuan Bangsa dan Politik Non OSS							B
	73	Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM Non OSS							B
	74	Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM				√			B
<b>DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARAWISATA</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Pemuda</b>								
	1	Jumlah pemuda wirausaha	√	√			√		T
	2	Jumlah pemuda yang trampil berwirausaha	√						T
	3	Jumlah Marcing Band Tupalayo						√	T
	4	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		√					T
	5	Jumlah pemuda pelopor	√				√		T
	6	Jumlah organisasi pemuda dan Pemuda Potensi yang aktif	√						T
	7	Jumlah Organisasi Pemuda					√	√	T
	8	Jumlah Anggota Masing-Masing Organisasi						√	T
	9	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda		√					T
	10	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		√					T
	11	Jumlah Kegiatan Pemuda					√		T
	12	Jumlah Pemuda Kader					√		T
	13	Jumlah Pemuda Potensi Yang Aktif						√	
	14	Indeks Pembangunan Kepemudaan				√			
<b>2</b>	<b>Bidang Olah Raga</b>								
	15	Jumlah atlet berprestasi	√				√		T
	16	Jumlah ajang Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kab/Kota	√						Tr
	17	Jumlah lembaga Olahraga yang berkembang	√						T
	18	Jumlah klub olahraga yang memperoleh dukungan sarana dan prasarana olah raga	√						T
	19	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat kab/Kota	√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
20	Jumlah Atlet Setiap Cabang Olahraga POPDA							√	T
21	Jumlah Pelatih Setiap Cabang Olahraga POPDA							√	T
22	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan		√						T
23	Jumlah Kelompok/Komunitas olahraga yang berkembang	√							T
24	Jumlah jenis olahraga yang digalakkan	√							T
25	Jumlah Olahraga Masyarakat							√	T
26	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		√						T
27	Jumlah jenis sarpras sport center dalam kondisi baik	√							T
28	Jumlah sarana/prasarana yang dikelola dan dikembangkan	√							T
29	Jumlah jenis sapras dalam kondisi baik	√							T
30	Jumlah Organisasi Olahraga					√			T
31	Jumlah Kegiatan Olahraga					√			T
32	Jumlah Lapangan Olahraga					√			T
33	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina					√			T
34	Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina					√			T
<b>3</b>	<b>Bidang Usaha Parawisata</b>								
35	Jumlah Pariwisata	√							B
36	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	√		√					B
37	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	√		√					B
38	Jumlah sarana/prasarana yang dikelola dan dikembangkan	√							T
39	Jumlah Fasilitas pada Objek Wisata	√							T
40	Jumlah sarana prasarana wisata yang terkelola dengan baik	√							T
41	Jumlah Jenis Sarana prasarana pariwisata dalam kondisi baik	√							T
42	Jumlah Obyek Wisata					√		√	T
43	Jumlah Kunjungan Objek Wisata Domestik dan Mancanegara					√		√	B
44	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata							√	T
45	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		√						T
46	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		√						T
47	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		√						T
48	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		√						B
49	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		√						T
50	Jumah Organisasi Pariwisata							√	T
51	Jumlah Hotel, Wisma dan Penginapan dengan Jumlah Kamar, Tempat Tidur dan Tenaga Kerja Menurut Akomodasi							√	T
52	Jumlah Biro Travel							√	T
53	Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan							√	T
54	Jumlah Kunjungan Hotel, Wisma dan Penginapan Wisatawan Domestik dan Mancanegara							√	B
55	Jumlah Kunjungan Restoran, Rumah Makan dan Warung Wisatawan Domestik dan Mancanegara							√	B
<b>4</b>	<b>Bidang Promosi Parawisata</b>								
56	Persentase Pameran/Even Promosi Wisata	√							T
57	Jumlah Destinasi Wisata	√							T
58	Jumlah potensi Wisata yang dipromosikan	√							T
59	Jumlah Destinasi Wisata yang berkembang	√							T
60	Jumlah Paket Promosi Wisata dalam Daerah & Luar Daerah yang Dilaksanakan							√	T
61	Jumlah Event Kepariwisataaan							√	Tr
62	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		√						T
63	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten		√						T
64	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		√						T

No.	Daftar Data*)		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
65		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		√						T
66		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		√						T
67		Jumlah ajang Wisata Lokal yang berkembang	√							T
68		Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan Komunitas Pelaku Usaha Pariwisata yang berkembang	√							T
69		Jumlah Promosi Hasil Ekonomi Kreatif Parawisata yang Dilaksanakan							√	T
70		Jumlah Promosi Hasil Ekonomi Kreatif Parawisata yang Diikuti							√	T
71		Kontribusi PDRB Pariwisata				√				
72		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif				√				
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>										
<b>1</b>	<b>Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca</b>									
1		Persentase komunitas literasi yang aktif di tingkat desa	√							T
2		Persentase desa yang memiliki komunitas literasi yang aktif	√							T
3		Persentase pemenuhan standar manajemen perpustakaan daerah yang baik	√							T
4		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		√						T
5		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		√						T
6		Rasio perpustakaan per satuan penduduk					√			T
7		Jumlah perpustakaan yang memiliki manajemen perpustakaan baik	√							T
8		Jumlah Objek Binaan Perpustakaan Kab. Polewali Mandar							√	T
9		Jumlah Perpustakaan Daerah					√		√	T
10		Jumlah Perpustakaan Kecamatan					√		√	T
11		Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan					√		√	T
12		Jumlah Perpustakaan Khusus							√	T
13		Jumlah Perpustakaan Komunitas							√	T
14		Jumlah Perpustakaan Sekolah SD/Sederajat							√	T
15		Jumlah Perpustakaan Sekolah SMP/Sederajat							√	T
16		Jumlah Perpustakaan Sekolah SMA/Sederajat							√	T
17		Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi							√	T
18		Jumlah Perpustakaan Masyarakat (Taman Baca Masyarakat)							√	T
19		Jumlah Perpustakaan Rumah Ibadah (Mesjid dan Gereja)							√	T
20		Jumlah Tenaga Pustakawan							√	T
21		Jumlah peserta pembudayaan kegemaran membaca melalui cerita	√							T
22		Jumlah komunitas literasi yang aktif dan berkembang	√							T
23		Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca							√	B
24		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		√						T
<b>2</b>	<b>Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Perpustakaan</b>									
25		Indeks kepuasan pelayanan perpustakaan	√							T
26		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat		√						T
27		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		√						T
28		Jumlah titik layanan perpustakaan rujukan	√							T
29		Jumlah koleksi bahan pustaka	√							T
30		Jumlah Koleksi Buku Pada Perpustakaan Keliling					√		√	T
31		Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Umum Daerah					√		√	T
32		Jumlah Koleksi Judul Buku					√		√	T
33		Jumlah Anggota Perpustakaan							√	B
34		Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling							√	B
35		Jumlah Pemustaka Perpustakaan Umum Daerah							√	B
36		Jumlah Pemustaka Perpustakaan Keliling							√	B
37		Jumlah pengunjung perpustakaan					√			

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
<b>3</b>	<b>Bidang Kearsipan</b>							
38	Predikat pengelolaan kearsipan	√						T
39	Presentase pemenuhan standar tata kelola kearsipan dinamis	√						T
40	Persentase pemenuhan standar tata kelola kearsipan statis	√						T
41	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		√					T
42	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		√					T
43	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		√					T
44	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		√					T
45	Jumlah arsip dinamis yang terpelihara dan telah dimusnahkan	√						T
46	Jumlah arsip statis yang telah diakuisisi, preservasi, dan akses arsip statis	√						T
47	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		√					T
48	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		√					T
49	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		√					T
50	Jenis Klasifikasi Arsip						√	T
51	Jumlah Kegiatan Retensi dan Pemusnahan Arsip							T
52	Jumlah arsip dinamis						√	T
53	Jumlah arsip statis						√	T
54	Jumlah Arsip Vital						√	T
55	Jumlah Arsip Aktif dan In Aktif						√	T
56	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku						√	T
57	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		√					T
58	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		√					T
59	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi		√					T
60	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		√					T
61	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		√					T
62	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		√					T
63	Jumlah Objek Binaan Arsip						√	T
64	Jenis Sosialisasi Kearsipan						√	T
65	Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Pengarsipan						√	T
66	Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B keatas				√			T
67	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang Ditindaklanjuti				√			T
68	Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD					√		T
69	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan)					√		T
70	Jumlah SDM pengelola arsip di LKD					√		T
71	Jumlah Box arsip					√		T
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Perikanan Budidaya</b>							
1	Panjang Saluran Tambak Budidaya						√	T
2	Jumlah total produksi perikanan budidaya	√						T
3	Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar				√			T
4	Jumlah Produksi Budidaya Tambak				√			T
5	Jumlah Produksi Budidaya Rumput Laut				√			T
6	Jumlah Pembudidaya Ikan kecil yang berkembang	√						T
7	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pelatihan/ sosialisasi	√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
8	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil yang berkembang	√						T
9	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan	√						T
10	Jumlah lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	√						T
11	Jumlah data kelompok pembudidayaan ikan	√						T
12	Luas Lahan Budidaya air Payau						√	T
13	Luas Lahan Budidaya air Tawar						√	T
14	Luas Lahan Budidaya air Laut						√	T
15	Jumlah Infrastruktur Jembatan dan Jalan Produksi Budidaya						√	T
16	Jumlah alat/bahan karantina	√						T
17	Jumlah pembudidayaan ikan yang memenuhi standar	√						T
18	Jumlah Pembenihan Ikan						√	T
19	Jumlah Jenis Hama dan Penyakit Ikan						√	S
20	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		√					T
<b>2</b>	<b>Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir</b>						√	
21	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		√					T
22	Luas area perikanan tangkap yang terkelola	√						T
23	Jumlah total produksi perikanan tangkap	√						T
24	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Komoditi Andalan					√		T
25	Jumlah Komoditi Unggulan Perikanan Tangkap						√	T
26	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	√						T
27	Jumlah Jenis Sarana Penunjang/Pendukung Tempat Pelelangan Ikan	√						T
28	Jumlah jenis sarana dan prasarana penangkapan ikan	√						T
29	Jumlah Sarana Usaha perikanan Tangkap	√						T
30	Jumlah data kelompok nelayan yang mempunyai sarana dan prasarana tangkap	√						T
31	Jumlah nelayan kecil yang mengikuti pelatihan dan bimbingan	√						T
32	Jumlah tempat pelelangan ikan	√						T
33	Jumlah Pulau-Pulau						√	T
34	Jumlah Jenis Penangkapan				√			T
<b>3</b>	<b>Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>							
35	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	√						T
36	Standarisasi Produk dan Non Produk Perikanan						√	T
37	Jumlah jenis produk hasil olahan perikanan yang dipasarkan memiliki jaminan mutu yang baik	√						B
38	Jumlah produk olahan hasil perikanan	√						B
39	Jumlah Produksi Pabrik Es						√	B
40	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan	√						B
41	Jumlah Penyimpanan per jenis komoditi perikanan pada Cool Stroge						√	B
42	Jumlah Jangkauan Pemasaran Hasil Perikanan						√	T
43	Jumlah Sarana dan Prasarana bagi pelaku usaha perikanan skala Mikro dan Kecil	√						T
<b>4</b>	<b>Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan</b>							
44	Rata-rata pendapatan nelayan				√			T
45	Pendapatan pembudidaya ikan				√			T
46	Capaian produksi perikanan					√		T
47	Capaian jumlah konsumsi ikan					√		T
48	Cakupan Binaan kelompok nelayan					√		T
49	Produksi perikanan kelompok binaan					√		T
50	Produksi garam				√			T
51	Konsumsi ikan				√			T
52	Jumlah Teknologi Yang Diterapkan di Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan						√	T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
53	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		√						T
54	Jumlah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang memenuhi standar	√							T
55	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP				√				T
56	Jumlah kelompok nelayan					√			T
57	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap						√		T
58	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya						√		T
59	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan						√		T
60	Jumlah Kelompok Pengawas Masyarakat						√		T
61	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok						√		T
62	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		√						T
63	Luas Wilayah Konservasi Penyu						√		T
64	Jumlah hari operasional speedboat				√				T
65	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan				√				T
66	Jumlah nelayan yang terlindungi				√				
67	Luas kawasan konservasi perairan				√				
68	Jumlah luasan usaha budidaya yang diindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya				√				
69	Konsumsi ikan				√				
70	Luas kawasan konservasi perairan yang operasional				√				
71	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya				√				
72	Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah yang diperiksa kepatuhannya				√				
<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Tanaman Pangan</b>								
1	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	√	√						T
2	Pembinaan kelompok pekarangan pangan lestari				√				T
3	Luas Panen Tanaman Pangan	√				√			S
4	Luas Lahan Pertanian menurut Kecamatan					√	√		T
5	Luas Lahan Bukan Pertanian menurut Kecamatan					√		√	T
6	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan							√	T
7	Luas Wilayah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Penggunaan Lahan							√	T
8	Luas Tanaman Padi							√	S
9	Luas Tanaman Palawija							√	S
10	Luas Panen Tanaman Palawija							√	S
11	Luas Panen Tanaman Hortikultura	√							S
12	Luas Panen Tanaman Obat-Obatan menurut Kecamatan Jenis Tanaman	√							S
13	Luas lahan bencana pertanian yang tertangani	√	√						B
14	Kawasan Jagung (Luas Pertanaman Jagung)				√				T
15	Kawasan Kedelai (Luas Pertanaman Kedelai)				√				T
16	Kawasan Padi (Luas Pertanaman Padi)				√				T
17	Kawasan Umbi-umbian (Luas Pertanaman Umbi-Umbian)				√				T
18	Kawasan Cabai (Luas Pertanaman Cabai)				√				T
19	Kawasan Bawang Merah (Luas Pertanaman Bawang Merah)				√				T
20	Kawasan Bawang Putih (Luas Pertanaman Bawang Putih)				√				T
21	Kawasan Sayuran (Luas Pertanaman Sayuran)				√				T
22	Kawasan Jeruk (Luas Pertanaman Jeruk)				√				T
23	Kawasan Florikultura ((Luas Pertanaman Florikultura)				√				T
24	Kawasan Mangga (Luas Pertanaman Mangga)				√				T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
25	Kawasan Manggis (Luas Pertanaman Manggis)				√			T
26	Kawasan Pisang (Luas Pertanaman Pisang)				√			T
27	Kawasan Durian (Luas Pertanaman Durian)				√			T
28	Kawasan Buah Lainnya (Luas Pertanaman Buah Lainnya)				√			T
29	Jumlah produksi padi	√				√		S
30	Jumlah produksi jagung	√				√		S
31	Jumlah Produksi kedelai	√				√		S
32	Jumlah alat dan mesin pasca panen pertanian	√						T
33	Jumlah benih padi, jagung dan kedelai yang didistribusikan	√						T
34	Jumlah Produksi Tanaman Palawija					√	√	S
35	Jumlah Produktivitas Tanaman Palawija					√	√	S
36	Jumlah Pembenihan Tanaman Pangan						√	S
37	Jumlah Produksi Buah-Buahan	√				√		S
38	Jumlah Produksi Sayuran	√				√		S
39	Jumlah bibit tanaman buah-buahan yang diokulasi	√						S
40	Jumlah jenis bibit hortikultura	√						S
41	Jumlah Produksi Buah-Buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah	√				√		S
42	Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura menurut Kecamatan berdasarkan Luas Lahan dan Jenis Bibit Tanaman	√						S
43	Jumlah Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pertanian yang Dikendalikan						√	S
44	Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan						√	B
45	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan						√	B
46	Jumlah Perangkap Babi	√						B
47	Jumlah Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	√						B
48	Jumlah Kelompok Penangkar Benih Padi yang terbina	√						T
49	Jumlah kelompok tani yang mengembangkan tanaman pekarangan	√						B
50	Jumlah Desa Yang Menerapkan P2L							B
<b>2</b>	<b>Bidang Peternakan</b>							
51	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	√						T
52	Penguatan Kelembagaan Veteriner (Jumlah Klp. Yang Diintervensi)				√			T
53	Banyaknya Inseminasi, Akseptor, Konsepsi, Jumlah Kelahiran dan Kematian Pada Ternak Sapi Kegiatan Inseminasi Buatan Dirinci Per Kecamatan						√	B
54	Jumlah Kelahiran hasil Inseminasi Buatan	√						B
55	Jumlah inseminasi buatan	√						B
56	Jumlah Jenis Pakan Ternak	√						B
57	Luas Areal Hijauan Pakan Ternak menurut Jenisnya						√	T
58	Jumlah Produksi Limbah Industri Pertanian sebagai Sumber Pakan						√	B
59	Jumlah Produksi Jerami sebagai Sumber Pakan						√	B
60	Jumlah Produksi Daging ,Kulit dan Telur menurut Kecamatan dan Jenis Ternak						√	T
61	Jumlah jenis Peredaran Pakan di Kabupaten Polewali Mandar						√	T
62	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	√						B
63	Jumlah jenis kasus penyakit hewan yang ditangani	√						Tr
64	Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	√						Tr
65	Jumlah populasi hewan yang sejahtera (Penyelamatan Betina Produktif)	√						T
66	Jumlah Jenis Sarana Kesehatan Hewan	√						T
67	Jumlah Jenis Layanan Jasa Medik Veteriner	√						T
68	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)						√	Tr
69	Jumlah dan Jenis Vaksinasi Yang Dilakukan						√	B

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
70	Jumlah Pemotongan Ternak Menurut Jenisnya dan Lokasi Pemotongannya Dirinci Per Kecamatan							√	B
71	Jumlah Rumah Potong Hewan yang terbangun	√							s
72	Jumlah Ternak yang Keluar & Masuk ke Kab Polewali Mandar					√		√	B
73	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran Ternak							√	B
74	Jumlah Populasi Sapi	√							B
75	Jumlah Populasi Kambing	√							B
76	Jumlah Populasi Unggas	√							B
77	Jumlah Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	√							B
78	Jumlah ternak Sapi dan Kambing	√							B
79	Jumlah unit usaha ternak sapi yang berkembang	√							B
80	Jumlah Ternak Betina Produktif yang terlindungi	√							B
81	Jumlah Populasi Ternak Besar					√		√	B
82	Jumlah Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan							√	B
83	Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan							√	B
84	Jumlah Penyebaran Ternak Pemerintah							√	B
85	Jumlah Asuransi Ternak Sapi / Kerbau (AUTS/K)							√	Tr
86	Jumlah Klaim Peserta Asuransi Ternak Sapi / Kerbau (AUTS/K)							√	Tr
87	Jumlah dan Jenis Ternak Yang Disembelih di RPH							√	B
<b>3</b>	<b>Bidang Perkebunan</b>								
88	Optimasi Kelapa Sawit Rakyat				√				T
89	Perkembangan Harga Pasar Komoditi Perkebunan							√	B
90	Luas Areal Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar								B
91	Luas Areal (Ha) Serangan hama PBK Tanaman Kakao							√	B
92	Luas Areal (Ha) serangan penyakit Helopeltis Sp Tanaman Kakao							√	B
93	Luas areal (Ha) serangan hama Tikus Tanaman Kakao							√	B
94	Luas areal (Ha) serangan penyakit VSD Tanaman Kakao							√	B
95	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Busuk Buah Tanaman Kakao							√	B
96	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Kangker Batang Tanaman Kakao							√	B
97	Luas Areal (Ha) Serangan Hama Penggerek Batang Tanaman Kakao							√	B
98	Luas Areal (Ha) Serangan Hama Oryctes Sp Tanaman Kelapa							√	B
99	Luas Areal (Ha) Serangan Hama Tupai Tanaman Kelapa							√	B
100	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Bubuk Buah Kopi Tanaman Kopi							√	B
101	Luas Areal (Ha) Serangan Penyakit Busuk Pangkal Tanaman Lada							√	B
102	Kawasan Kakao								T
103	Kawasan Kopi								T
104	Kawasan Sagu				√				T
105	Kawasan Kelapa				√				T
106	Kawasan Karet				√				T
107	Kawasan Tebu				√				T
108	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh				√				T
109	Jumlah Kelompok Usaha Kopra							√	T
110	Jumlah Kelompok Usaha Minyak Kelapa							√	T
111	Jumlah Kelompok Usaha Kakao							√	T
112	Jumlah Kelompok Usaha Arang Tempurung							√	T
113	Jumlah Kelompok Usaha Kopi							√	T
114	Jumlah Kelompok Usaha Gula Merah							√	T
115	Jumlah produksi Kakao	√							B
116	Jumlah produksi Kelapa	√							B



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
117	Jumlah Produksi Kopi	√						B
118	Jumlah bibit tanaman kakao yang disambung pucuk	√						B
119	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar							B
120	Jumlah Pengadaan Pestisida (Perkebunan)	√						B
121	Jumlah Kelompok tani perkebunan yang terlatih	√						T
122	Jumlah Kelompok usaha kakao yang terlatih	√						T
<b>4</b>	<b>Bidang Pengembangan SDM</b>							
123	Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik	√						T
124	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	√						T
125	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	√						T
126	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota		√					T
127	Peningkatan Kinerja Penyuluh di Kostratani (Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti Pelatihan Tematik)				√			T
128	Penerbitan izin usaha pertanian		√					B
129	Jumlah Penyuluh Pertanian Ahli dan Terampil	√						T
130	Jumlah Penyuluh pertanian yang terlatih	√						T
131	Jumlah Penyuluh yang dibayarkan honoranya	√						T
132	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian berdasarkan Diklat Fungsional yang Diikuti						√	T
133	Jumlah Tenaga Penyuluh berdasarkan Wilayah Kecamatan						√	T
134	Jumlah Penyuluh Pertanian Berdasarkan Status Kepegawaian (PNS, PPPK,PTT)						√	T
135	Jumlah kelompok tani yang telah dinilai	√						T
136	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk	√						T
137	Jumlah Kelompok Tani berdasarkan Kelas Kelompok						√	T
138	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)						√	T
139	Jumlah Kelembagaan Ekonomi menurut kecamatan, jumlah dan bentuk kelembagaanya						√	T
140	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	√						T
141	Jumlah Jenis sarana penyuluhan	√						T
142	Jumlah Sarana Prasarana Penyuluhan						√	T
143	Jumlah balai penyuluh di kecamatan yang terbangun/terehabilitasi	√						S
<b>5</b>	<b>Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian</b>							
144	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	√						T
145	Persentase prasarana yang digunakan		√					T
146	Optimasi Lahan Pertanian (Bantuan Pupuk)				√			T
147	Luas alih fungsi lahan					√		T
148	Luas peretakan sawah					√		T
149	Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai LP2B							T
150	Perluasan Areal Pertanian/Cetak Sawah (Perluasan Sawah)				√			T
151	Jumlah jenis peta Prasarana Pertanian	√						S
152	Jumlah Kecamatan yang memiliki peta lahan baku sawah	√						S
153	Jumlah bangunan Prasarana Pertanian, perkebunan dan peternakan	√						S
154	Jumlah Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Yang Dikeluarkan						√	B
155	Jumlah Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Perkebunan Yang Dikeluarkan						√	B
156	Jumlah Sarana pertanian yang diberikan (Alasintan)		√					S
157	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan (Unit)		√					S
158	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/terehabilitasi	√						B
159	Jumlah Peta jaringan Daerah Irigasi	√						B
160	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang terbangun	√				√		B
161	Jumlah embung yang terbangun	√				√		B
162	Jumlah jalan usaha tani yang terbangun	√				√		B

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	Usulan OPD	
163	Jumlah DAM Parit yang terbangun	√							B
164	Jumlah Long Storage yang terbangun	√							B
165	Jumlah pintu air yang terbangun	√							B
166	Jumlah Jembatan tani yang terbangun					√			B
167	Jumlah Kelompok Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)							√	B
168	Jumlah Kelompok P3A, GP3A dan IP3A menurut Kecamatan							√	B
169	Jumlah Asuransi Pertanian							√	B
170	Klaim Asuransi Pertanian							√	B
171	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disebarakan menurut Kecamatan berdasarkan Jenisnya							√	B
172	Jumlah Alat dan Mesin pra Panen Pertanian							√	B
173	Jumlah Penggunaan Pupuk Pada Tanaman Pangan Padi							√	B
174	Jumlah Penggunaan Pupuk Pada Tanaman Palawija							√	B
175	Jumlah Penggunaan Pestisida Pada Tanaman Padi							√	B
176	Jumlah Penggunaan Pestisida Pada Tanaman Palawija							√	B
177	Jumlah Produksi Pupuk Kompos							√	B
<b>6</b>	<b>Bidang Ketahanan Pangan</b>								
178	Indeks Ketahanan Pangan	√							T
179	Skor PPH Ketersediaan	√				√			T
180	Skor PPH Konsumsi	√		√					B
181	Harga Pangan Strategis							√	B
182	Nilai Stabilitas Harga Pangan Strategis							√	B
183	Lumbung Pangan Masyarakat					√			T
184	Pertanian Keluarga/Family Farming					√			T
185	Pertanian Masuk Sekolah					√			T
186	Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan					√			T
187	Persentase daerah rentan rawan pangan	√		√					T
188	Persentase cadangan pangan masyarakat	√							T
189	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	√							B
190	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	√	√	√					B
191	Jumlah total Lumbung Pangan Masyarakat	√							B
192	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten	√							B
193	Jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	√	√						Tr
194	Jumlah kebijakan penanganan kerawanan pangan	√							T
195	Jumlah Penerima Manfaat Rumah Tangga Rawan pangan	√							Tr
196	Jumlah Lumbung pangan yang terbangun	√							B
197	Jumlah lantai jemur yang terbangun	√							B
198	Jumlah Ketersediaan Pangan berdasarkan Hasil Perhitungan NBM (Neraca Bahan Makanan)							√	B
199	Jumlah Ketersediaan Pangan Strategis							√	B
200	Jumlah Penduduk dan kecamatan Rawan Pangan (SKPG)							√	B
201	Jumlah ketersediaan regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		√						B
202	Jumlah penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		√						B
203	Jumlah Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	√							B
204	Jumlah dokumen data konsumsi pangan per kapita per tahun	√							B
205	Jumlah Konsumsi Pangan berdasarkan Survey Konsumsi							√	B
206	Jumlah Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di bawah 1400 kkal (Sangat Rawan Pangan)							√	B
207	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		√						B
208	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		√						B

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
209	Jumlah Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi	√						B
210	Jumlah Publikasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	√						B
211	Jumlah stok, pasokan dan Harga Pangan yang terkendali	√						B
212	Jumlah Pangan yang didistribusikan ke kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar						√	B
213	Jumlah Potensi Penerima Pendistribusian Pangan ke Daerah Rawan Pangan						√	B
214	Jumlah Pasokan Pangan Strategis						√	B
215	Jumlah ketersediaan infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		√					B
216	Jumlah penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya		√					B
	..... Dst, dapat ditambahkan jika diperlukan dan data tersedia							
<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Perindustrian</b>							
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	√						T
2	Persentase Pertumbuhan Industri Mikro	√						T
3	Persentase Pertumbuhan Industri Menengah	√						T
4	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja				√			T
5	Jumlah Kelompok IKM yang mampu meningkatkan produk olahan makanan dan minuman yang berdaya saing	√						T
6	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana industri yang terbangun	√						T
7	Jumlah kelompok industri kecil yang terlatih	√						T
8	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Kecil menurut Jenis Industri (Non Makanan dan Minuman)					√	√	T
9	Jumlah Perusahaan pada Industri Kecil Menurut Jenis Industri (Makanan Dan Minuman)					√	√	T
10	Jumlah Tenaga kerja pada industri kecil menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
11	jumlah nilai produksi pada industri kecil menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
12	jumlah nilai investasi pada industri kecil menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
13	jumlah sentra industri mikro, kecil dan menengah menurut jenis industri (makanan dan minuman)					√	√	T
14	Jumlah Nilai Produksi dan Nilai Investasi pada Industri Kecil menurut Jenis Industri (Non Makanan dan Minuman)					√	√	T
15	jumlah nilai investasi pada industri kecil menurut jenis industri (non makanan dan minuman)					√	√	T
16	Jumlah Industri Sandang (pemintalan benang pertenunan, pakaian jadi, dll)					√		T
17	Jumlah Industri Pangan (Makanan, dan Minuman Tradisional)					√		T
18	Jumlah Industri kerajinan (kayu, rotan, bamboo, gerabah, dll)					√		T
<b>2</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>							
19	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	√						T
20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		√					T
21	Persentase penerbitan TDG		√					T
22	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG		√					T
23	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		√					T
24	Pertumbuhan ekspor non migas				√			T
25	Daftar Harga Bahan Pokok (Bapok)	√						B
26	Pasar Kecamatan	√						T
27	Pasar Desa						√	T
28	Jumlah pedagang pasar yang ditingkatkan kompetensinya	√						T
29	Jumlah Pedagang Pasar						√	T
30	Jumlah pasar yang diberdayakan	√						T
31	Jumlah sarana pendukung distribusi perdagangan yang disediakan	√						T
32	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		√					T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
<b>3</b>	<b>Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen</b>							
	33 Persentase Standarisasi Produk dan Perlindungan Konsumen	√						T
	34 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota		√					T
	35 Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa					√		Tr
	36 Jumlah pelayanan pengaduan konsumen	√				√		B
<b>4</b>	<b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
	37 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	38 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	39 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	40 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	41 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	42 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	43 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		√					T
	44 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	45 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	46 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	47 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	48 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√					T
	49 Persentase Usaha Mikro yang Terstandarisasi	√						T
	50 Persentase usaha mikro yang memiliki legalitas dan standarisasi usaha	√						T
	51 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		√					T
	52 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		√					T
	53 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan		√					T
	54 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		√					T
	55 Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	√						T
	56 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan						√	T
	57 Jumlah Koperasi Per Jenis						√	T
	58 Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dengan toko dan retail modern	√						T
	59 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)						√	T
<b>5</b>	<b>UPTD Metrologi</b>							
	60 Persentase pelaksanaan metrologi legal dan penanganan kasus	√						T
	61 Persentase kasus yang tertangani	√						T
	62 Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	√	√					Tr
	63 Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa serta BDKT yang dilakukan	√						Tr
	64 Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP						√	Tr
	65 Jumlah Hasil Pengawasan UTTP dan BDKT		√					Tr

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
<b>DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Perencanaan, Fasilitas Pertanian Transmigrasi, ESDM</b>							
1	Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi							
2	Jumlah Rumah Tangga Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS)							T
3	Jumlah Rumah Tangga Transmigrasi Penduduk Asal (TPA)						√	T
4	Jumlah Kawasan Transmigrasi		√					T
5	Jumlah wilayah Penempatan Transmigrasi						√	T
6	Jumlah Penduduk Transmigrasi						√	T
7	Luas Pencadangan Areal						√	T
8	Jumlah data Ukur, Bagi, Lahan						√	T
9	Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	√						T
10	Jumlah Dokumen Rencana Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	√						T
11	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Transmigrasi (RTSP)	√						T
12	Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi	√						T
<b>2</b>	<b>Bidang Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi</b>							
13	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi	√						T
14	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi yang tertata persebaran penduduknya	√						T
15	Jumlah KK transmigran yang terbina kesiapan lingkungan hunian	√						T
16	Jumlah warga yang memahami transmigrasi	√						T
17	Jumlah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi dalam kondisi memadai	√						T
18	Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik			√				T
19	Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Dari PLN dan Bukan PLN			√				T
20	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		√					T
21	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		√					T
22	Jumlah Fasilitas Umum							T
23	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi						√	T
24	Luas Lahan Usaha I						√	T
25	Luas Lahan Usaha II						√	T
26	Luas Lahan Pekarangan							T
27	Jumlah Penghasilan Transmigrasi						√	T
28	Jumlah Penerima Perbekalan						√	T
29	Jumlah Penerima Bantuan Saprotan						√	T
30	Jumlah lokasi transmigrasi baru				√			
<b>3</b>	<b>Bidang Tenaga Kerja</b>							
31	Persentase tenaga kerja yang terserap	√						T
32	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		√					T
33	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		√					T
34	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		√					T
35	Persentase LPK yang terakreditasi		√					T
36	Persentase LPK yang memiliki perizinan		√					T
37	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		√					T
38	Persentase penyerapan lulusan		√					T
39	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		√					T
40	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		√					T
41	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		√					T
42	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		√					T
43	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		√					T
44	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan							T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
45	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		√					T
46	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		√					T
47	Jumlah tenaga kerja terampil	√						T
48	Jumlah Perusahaan dan Jumlah Karyawan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan	√						T
49	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Kompeten	√						T
50	Jumlah Calon Tenaga Kerja Terampil	√						T
51	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Kerja						√	T
52	Jumlah kegiatan TKM (Tenaga Kerja Mandiri)						√	T
53	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota		√					T
54	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		√					T
55	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		√					T
56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan							T
57	Jumlah penganggur yang dilatih		√					T
58	Lulusan bersertifikat kompetensi		√					T
59	Jumlah Perusahaan dan Karyawan Yang Telah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS TK	√		√				T
60	Jumlah Perusahaan yang telah Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	√				√		T
61	Jumlah Informasi pasar kerja						√	T
62	Jumlah pendaftaran ID dan rekomendasi paspor CPMI						√	T
63	Jumlah fasilitasi & mediasi perselisihan hubungan industri						√	T
64	Jumlah PMI dan Lokasi Penempatan						√	T
65	Jumlah Tenaga Kerja Dalam Daerah						√	T
66	Jumlah Tenaga Kerja Asing						√	T
67	Jumlah Tenaga Kerja Usia Muda (15-24 Thn) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan						√	T
68	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Informal Disektor Non Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin			√				T
69	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan & Jenis Kelamin						√	T
70	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Penempatan dan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (PMI)						√	T
71	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan		√					T
72	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		√					T
73	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		√					T
74	Jumlah mogok kerja		√					T
75	Jumlah penutupan perusahaan		√					T
76	Jumlah perselisihan kepentingan		√					T
77	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		√					T
78	Jumlah perselisihan PHK		√					T
79	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		√					T
80	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		√					T
81	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		√					T
82	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		√					T
83	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		√			√		T
84	Jumlah pencari kerja yang terserap					√		T
85	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		√					T
86	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		√					T
87	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		√					T
88	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		√					T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
89	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		√						T
90	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		√						T
91	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi keputungan		√						T
92	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		√						T
93	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		√						T
94	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		√						T
95	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri				√				T
96	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak				√				T
97	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.				√	√			T
98	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru				√				T
99	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan				√				T
100	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3				√				T
101	Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)				√				T
102	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK				√				T
103	Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah				√				T
104	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah				√				T
105	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah				√				T
106	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Daerah				√				T
107	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas				√				T
108	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan				√				T
109	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama				√				T
110	Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja				√				T
111	Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan				√				T
112	Jumlah Lembaga kerja sama tripartit atau dewan pengupahan provinsi dan kab./kota yang telah menjalankan fungsinya				√				T
113	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit				√				T
114	Jumlah Unit layanan disabilitas				√				T
115	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar				√				T
116	Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja				√				T
117	Jumlah Perusahaan					√			T
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
1	<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>								
1	Persentase penanganan kasus konflik batas wilayah yang ditindak lanjuti	√							T
2	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan otonomi daerah	√							T
3	Laporan kordinasi monitoring dan evaluasi pemerintahan kependudukan pemberdayaan masyarakat dan desa	√							T
4	Jumlah dokumen administrasi tata Pemerintahan yang disusun	√							T
5	Jumlah dokumen laporan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat , dan Penanggulangan Bencana	√							T
6	Jumlah dokumen Laporan koordinasi monitoring dan evaluasi kesatuan bangsa dan politik	√							T
7	Jumlah dokumen regulasi Pertanahan, Kesatuan Bangsa, dan Politik	√							T
8	Jumlah dokumen regulasi ketentraman ketertiban perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana	√							T
9	Jumlah dokumen administrasi pemekaran wilayah	√							T
10	Jumlah Dokumen tapal batas wilayah administrasi antar daerah	√							T

No.	Daftar Data*)		Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
			RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
	11	Jumlah Dokumen Toponimi	√							T
	12	Jumlah dokumen LPPD, RLPPD,LKPJ.	√							T
	13	Jumlah dokumen laporan pemantauan tahapan pemilu pilkada	√							T
	14	Jumlah dokumen standar pelayanan minimal (SPM) Daerah	√							T
<b>2</b>		<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>								
	15	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	√							T
	16	Persentase Masyarakat Miskin yang Terfasilitasi	√							T
	17	Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Terfasilitasi	√							T
	18	Jumlah Perangkat Rumah Ibadah yang Menerima insentif	√							T
	19	Jumlah Perjalanan Ibadah Haji/Umroh yang Terlaksana	√							S
	20	Jumlah Penerima Bantuan bidang Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan	√							S
	21	Jumlah Calon Jemaah Haji	√			√		√		T
	22	Jumlah Insentif Imam dan Perangkat Rumah Ibadah						√		T
	23	Jumlah Organisasi Keagamaan						√		T
	24	Jumlah pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan						√		Tr
	25	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan						√		Tr
	26	Jumlah Pembinaan Pendidikan Keagamaan (MTQ)	√							T
	27	Jumlah Organisasi Perempuan yang Terfasilitasi	√							T
	28	Jumlah Mahasiswa Penyelesaian Study, Beasiswa Berprestasi dan Penghafal Al-Quran Bagi Masyarakat Tidak Mampu	√							T
	29	Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan Sertifikat Mampu Baca Al Quran	√							T
	30	Jumlah dokumen regulasi Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	√							T
<b>3</b>		<b>Bagian Hukum</b>								
	31	Persentase produk hukum yang harmonis	√							T
	32	Persentase Peraturan Bupati yang ditetapkan	√							T
	33	Persentase Surat Keputusan yang ditetapkan	√							T
	34	Persentase Peraturan Bupati yang terpublikasi dalam JDIH	√							T
	35	Persentase Surat Keputusan yang terpublikasi dalam JDIH	√							T
	36	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	√							T
	37	Jumlah Surat Edaran						√		Tr
	38	Jumlah Instruksi Bupati								
	39	Jumlah Harmonisasi Produk Hukum						√		T
	40	Jumlah Kasus Pengaduan Perkara Litigasi dan Non Litigasi yang di Fasilitasi	√							B
	41	Jumlah Laporan Kabupaten Peduli HAM dan Laporan Aksi HAM	√							T
	42	Jumlah Peraturan Daerah yang terpublikasi dalam JDIH	√							T
<b>4</b>		<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>								
	43	Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	√							T
	44	Jumlah dokumen administrasi pembangunan yang disusun	√							T
	45	Jumlah dokumen fasilitasi Program Pembangunan yang tersusun	√							T
	46	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	√							T
	47	Jumlah Dokumen Laporan hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	√							T
	48	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perencanaan Program Pembangunan Daerah						√		T
	49	Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah						√		Tr
	50	Jumlah pemantauan dan evaluasi TEPR						√		Tr
	51	Jumlah pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan						√		T
	52	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah						√		T



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
	53	Jumlah rekomendasi dan tindaklanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah						√	T
	54	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah						√	T
<b>5</b>		<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>							
	55	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi	√						Tr
	56	Jumlah paket pekerjaan Jasa Konsultan	√						Tr
	57	Jumlah paket pekerjaan Penyedia Barang	√						Tr
	58	Jumlah paket pekerjaan Jasa Lainnya	√						Tr
	59	Jumlah dokumen rekomendasi Pemanfaatan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	√						T
	60	Jumlah Perencanaan Pengadaan Barang secara Elektronik							T
	61	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik							T
	62	Jumlah pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik							Tr
	63	Jumlah Katalog Elektronik Lokal/ Sektoral							Tr
	64	Jumlah peserta/orang pembinaan/advokasi pengadaan barang dan jasa	√						T
	65	Jumlah peserta bimbingan teknis, pendampingan, dan /atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP							T
	66	Jumlah Personil UKPBJ							T
	67	Jumlah Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Mediasi							T
<b>6</b>		<b>Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam</b>							
	68	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	√						T
	69	Persentase pemantauan kebijakan terkait SDA yang tepat waktu	√						T
	70	Jumlah Dokumen Regulasi Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,UKM dan ESDM	√						T
	71	Jumlah Dokumen Regulasi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	√						T
	72	Jumlah Dokumen Regulasi Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan dan Badan Usaha Daerah	√						T
	73	Jumlah dokumen laporan Akses Keuangan Daerah yang Tersusun	√						T
	74	Jumlah Dokumen Inflasi Yang Tersusun	√						T
	75	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perindustrian	√						T
	76	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perdagangan	√						T
	77	Jumlah Kebijakan daerah tentang Koperasi	√						T
	78	Jumlah Kebijakan daerah tentang UKM	√						T
	79	Jumlah Kebijakan daerah tentang ESDM	√						T
	80	Jumlah Kebijakan daerah tentang Pertanian						√	T
	81	Jumlah Kebijakan daerah tentang Pangan						√	T
	82	Jumlah Kebijakan daerah tentang Kelautan dan Perikanan						√	T
	83	Jumlah Kebijakan daerah tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan						√	T
	84	Jumlah Kebijakan daerah tentang Pendapatan						√	T
	85	Jumlah Kebijakan Kebijakan daerah tentang Penanaman Modal						√	T
	86	Jumlah Kebijakan daerah tentang Perijinan						√	T
	87	Jumlah Kebijakan daerah tentang Badan Usaha Daerah						√	T
	88	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perindustrian	√						T
	89	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Koperasi						√	T
	90	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi UKM						√	T
	91	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi ESDM						√	T
	92	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pertanian						√	T
	93	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pangan						√	T
	94	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Kelautan dan Perikanan						√	T
	95	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan						√	T
	96	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pendapatan						√	Tr
	97	Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Penanaman Modal						√	Tr



No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
	139	Jumlah Pewarta						√	T
	140	Jumlah Upacara Hari Besar Nasional						√	T
	141	Jumlah hari Besar Keagamaan						√	T
<b>9</b>		<b>Bagian Umum</b>							
	142	Jumlah pegawai Sekretariat Daerah						√	T
	143	Jumlah dokumen Persuratan						√	T
	144	Jumlah dokumen Kinerja Program dan Kegiatan Setda						√	T
	145	Jumlah dokumen Kinerja Keuangan Setda						√	T
	146	Jumlah dokumen Renstra Setda						√	T
	147	Jumlah dokumen Renja Setda						√	T
	148	Jumlah dokumen RKA Setda						√	T
	149	Jumlah sarana prasarana Ruman Jabatan						√	T
	150	Jumlah tenaga Pelayanan rumah jabatan						√	T
	151	Jumlah barang Inventaris Setda						√	T
	152	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Setda						√	T
<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>									
<b>1</b>		<b>Bagian Umum</b>							
	1	Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√						T
	2	Daftar Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin						√	T
<b>2</b>		<b>Bagian Risalah dan Persidangan</b>							
	3	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu	√						T
	4	Persentase Layanan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√						T
	5	Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√						T
	6	Persentase Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√						T
	7	Jadwal Persidangan						√	S
	8	Jumlah Rekapitulasi Kegiatan Rapat DPRD						√	S
	9	Jumlah Rekapitulasi Produk Hukum DPRD						√	T
	10	Jumlah Keputusan menurut Jenis Keputusan DPRD						√	T
<b>3</b>		<b>Bagian Hubungan Masyarakat</b>							
	11	Persentase Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai standar dan tepat waktu	√						T
	12	Jumlah Penerimaan Aspirasi Masyarakat ke DPRD						√	B
	13	Jumlah Aspirasi Masyarakat Yang ditindak Lanjuti						√	B
<b>BALITBANGREN</b>									
<b>1</b>		<b>Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>							
	1	Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	√				√		T
	2	Persentase Konsistensi sub kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√				√		T
	3	Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√				√		T
	4	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√				√		T
	5	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan					√		T
	6	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan					√		T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	Usulan OPD	
7	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					√			T
8	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					√			T
9	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					√			T
10	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					√			T
11	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					√			T
12	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					√			T
13	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					√			T
<b>2</b>	<b>Bidang Ekonomi</b>								
14	Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	√				√			T
15	Persentase Konsistensi sub kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√				√			T
16	Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√				√			T
17	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√				√			T
18	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang ekonomi					√			T
19	Persentase penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan					√			T
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					√			T
21	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					√			T
22	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					√			T
23	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					√			T
24	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					√			T
25	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					√			T
26	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								T
27	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi								T
28	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					√			T
<b>3</b>	<b>Bidang Sosial Budaya</b>								
29	Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	√				√			T
30	Persentase Konsistensi sub kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√				√			T
31	Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	√				√			T
32	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√				√			T
33	Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang sosial budaya					√			T
34	Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan					√			T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data							Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	Usulan OPD	
35	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					√			T
36	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					√			T
37	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					√			T
38	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					√			T
39	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					√			T
40	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					√			T
41	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					√			T
42	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik								T
43	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial								T
44	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								T
<b>4</b>	<b>Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program</b>								
45	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	√				√			T
46	Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD	√				√			T
47	Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah	√				√			T
48	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan					√			T
49	Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah					√			T
50	Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan					√			T
51	Jumlah laporan hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					√			T
52	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)					√			T
53	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					√			T
54	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					√			T
55	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					√			T
56	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					√			T
57	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					√			T
58	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					√			T
59	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					√			T
60	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					√			T
61	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					√			T
<b>5</b>	<b>UPTD AGRO TECHNO PARK</b>								
62	Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan	√							
63	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan					√			T
64	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					√			T
<b>BADAN KEUANGAN</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Anggaran</b>								
1	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	√							T
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu	√							T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD				√			T
4	Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Pokok						√	T
5	Pagu Anggaran Belanja Daerah Pokok						√	T
6	Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah Pokok							T
7	Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan						√	T
8	Pagu Anggaran Belanja Daerah Perubahan						√	T
9	Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah Perubahan							T
10	Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Revisi							T
11	Pagu Anggaran Belanja Daerah Revisi							T
12	Pagu Anggaran Pembiayaan Daerah Revisi							T
13	Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√						T
14	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√						T
15	Jumlah Dokumen RKA/RKA-P dan DPA/DPA-P yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√						T
16	Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu						√	T
17	Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu						√	T
18	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting	√						T
19	Jumlah Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan						√	T
20	Jumlah Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pokok						√	T
<b>2</b>	<b>Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan</b>							
21	Persentase pencairan belanja tepat waktu	√						B
22	Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu	√						B
23	Jumlah Laporan Kas Daerah sesuai standar dan prosedur	√						B
24	Jumlah Jenis Dana Transfer yang di Kelola sesuai standar dan prosedur	√						B
25	Jumlah Daftar Gaji Perangkat Daerah yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	√						B
26	Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai standar dan prosedur	√						B
27	Jumlah Rekomendasi SPM yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	√						B
28	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah	√						T
29	Jumlah Realisasi DAK						√	Tr
30	Jumlah SP2D yang Terbit						√	B
<b>3</b>	<b>Bidang Akuntansi dan Pelaporan</b>							
31	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	√						T
32	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	√						T
33	Jumlah dokumen akuntansi keuangan daerah diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu	√						T
34	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi keuangan sesuai standar dan tepat waktu	√						T
35	Jumlah Pejabat Akuntansi dan Pelaporan yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	√						T
36	Jumlah Realisasi Pendapatan						√	B
37	Jumlah Realisasi Belanja						√	B
38	Jumlah Realisasi Pembiayaan						√	B
39	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√						Tr
40	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√						Tr
41	Jumlah Rancangan Perda Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	√						T
42	Jumlah Utang Kabupaten Polewali Mandar						√	T
43	Jumlah Piutang Kabupaten Polewali Mandar							T
44	Jumlah Ekuitas Kab. Polewali Mandar						√	T
45	Jumlah Penyertaan Modal Kab. Polewali Mandar							T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
<b>4</b>	<b>Bidang Aset</b>							
46	Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar	√						T
47	Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola BMD	√						T
48	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai standar dan tepat waktu	√						T
49	Jumlah Regulasi Standar Satuan Harga yang Tersusun sesuai standar dan prosedur	√						T
50	Jumlah Aset Kabupaten Polewali Mandar							
51	Jumlah Rekapitulasi Barang ke Neraca						√	T
52	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilengkapi administrasi penilaian sesuai standar dan tepat waktu	√						T
53	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan BMD sesuai standar dan tepat waktu	√						T
54	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aset/ Barang Milik Daerah sesuai standar dan tepat waktu	√						T
55	Jumlah Laporan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dilengkapi administrasi Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai standar dan prosedur	√						T
56	Jumlah Laporan Penjualan Barang Milik Daerah yang dilengkapi administrasi Penjualan Barang Milik Daerah sesuai standar dan prosedur	√						T
57	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah sesuai standar dan tepat waktu	√						T
<b>BADAN PENDAPATAN</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Perencanaan, Perhitungan Dan Penetapan Pendapatan</b>							
1	Jenis penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah						√	T
2	Jumlah penerimaan Pajak Daerah	√						B
3	Jumlah Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	√						T
4	Jumlah Rencana Anggaran Pendapatan	√						T
5	Jumlah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah						√	T
6	Jumlah Pengembangan Potensi Pendapatan						√	T
7	Jumlah Pemutakhiran Pajak Bumi Bangunan (PBB)						√	B
8	Jumlah Pendistribusian SPPT, DHKP, PBB						√	T
9	Jumlah Sistem Pajak Daerah yang berfungsi secara optimal	√						T
10	Jumlah Pendukung Sistem Informasi Pendapatan						√	T
11	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan						√	T
<b>2</b>	<b>Bidang Penagihan I</b>							
							√	B
12	Jumlah Pengawasan Pajak Restoran dan Parkir						√	B
13	Jumlah Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Restoran dan Parkir						√	B
14	Jumlah Pengawasan Pajak dan Hotel Sarang Burung Walet						√	B
15	Jumlah Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet						√	B
16	Jumlah Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Hiburan						√	B
17	Jumlah Obyek Pajak Restoran dan Parkir						√	B
18	Jumlah Subyek Pajak Restoran dan Parkir						√	B
19	Jumlah Obyek Pajak Reklame dan Hiburan						√	B
20	Jumlah Subyek Pajak Reklame dan Hiburan						√	B
21	Jumlah Obyek Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet						√	B
22	Jumlah Subyek Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet						√	B
23	Jumlah Penertiban Pajak Reklame						√	B
24	Jumlah Pengawasan Pajak Hiburan						√	B
<b>3</b>	<b>Bidang Penagihan II</b>							
25	Jumlah basis data pajak dan retribusi daerah yang telah dimutakhirkan	√						T
26	Jumlah Wajib Pajak menurut Kecamatan						√	T
27	Jumlah wajib pajak yang taat bayar pajak	√						B

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
	28	Jumlah penerimaan Retribusi Daerah	√						B
	29	Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat penerimaannya	√						T
	30	Jumlah wajib retribusi daerah yang memahami kewajiban membayar retribusi daerah	√						B
	31	Jumlah Penetapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) menurut Kecamatan						√	T
	32	Jumlah Subyek dan Obyek Pajak Bumi Bangunan (PBB) menurut Kecamatan						√	T
	33	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah						√	T
	34	Jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBLB)						√	T
	35	Jumlah Wajib Pajak BPHTB						√	T
	36	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah						√	B
	37	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLBLB)						√	B
	38	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB						√	B
	39	Jumlah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya						√	B
	40	Jumlah Jenis Alat Pungut Retribusi Daerah						√	T
	41	Jumlah Penyaluran Barang Kuasi						√	T
4	<b>Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan Dan Pelaporan</b>								
	42	Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	√						T
	43	Jumlah Peraturan Daerah						√	T
	44	Jenis Pajak yang Telah Disosialisasikan						√	T
	45	Jumlah Wajib Pajak yang terpantau realisasi penerimaannya	√						T
	46	Jumlah Pajak Daerah						√	T
	47	Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Telah Dilakukan Pengawasan						√	B
	48	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah						√	B
<b>BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
1	<b>Bidang Pengadaan Informasi dan Kinerja Pegawai</b>								
	1	Indeks Profesionalitas Aparatur	√						T
	2	Jumlah Dokumen Formasi Pegawai	√						T
	3	Jumlah CPNS dan PPPK yang lulus dalam tes pengadaan CPNS dan PPPK	√						T
	4	Jumlah Sistem informasi Kepegawaian yang dikembangkan	√						T
	5	Jumlah perangkat daerah yang telah optimal dalam pengelolaan data kepegawaian	√						T
	6	Jumlah Data ASN yang valid dan up to date	√						T
	7	Jumlah administasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang tertib	√						T
	8	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan						√	T
	9	Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural						√	T
	10	Jumlah PNS Per OPD				√		√	T
	11	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Ruang						√	T
	12	Jumlah ASN dengan penilaian kinerja Baik	√						T
	13	Jumlah perangkat daerah yang telah tertib dalam penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	√						T
	14	Jumlah ASN yang berprestasi yang menerima Penghargaan	√						T
	15	Jumlah laporan disiplin ASN	√						T
	16	Jumlah kasus pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	√						T
	17	Jumlah Wajib Lapor LHKPN						√	T
	18	Jumlah 'Wajib Lapor LHKASN						√	T
2	<b>Bidang Administrasi Kepegawaian</b>								
	19	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi jabatan	√						T
	20	Total Jabatan				√			T
	21	Jumlah ASN yang Mutasi dan Promosi sesuai standar dan prosedur	√						T
	22	Jumlah Layanan Administrasi Mutasi ASN yang tertib	√						T
	23	Jumlah ASN yang mengikuti Seleksi terbuka pengisian JPT	√						T



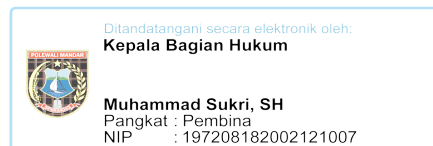
No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
	24	Jumlah Layanan Adminitrasi Kepegawaian						√	S
	25	Jumlah SK kenaikan pangkat yang memenuhi ketentuan dan diserahkan tepat waktu	√						S
	26	Jumlah PNS yang diusulkan memperoleh syarat kenaikan pangkat	√						T
	27	Jumlah PNS yang Ditempatkan dan diangkat dalam jabatan baru						√	T
	28	Jumlah Data kenaikan pangkat periode April dan Oktober						√	S
	29	Jumlah Data jabatan Fungsional Tertentu						√	T
<b>3</b>	<b>Bidang Pendidikan dan Pelatihan</b>								
	30	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Teknis	√						T
	31	Jumlah ASN yang telah memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional	√						T
	32	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	√						T
	33	Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim dan Diklat Fungsional	√			√			T
	34	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS				√		√	T
	35	Jumlah dokumen Rencana pengembangan kompetensi	√						T
	36	Jumlah ASN yang mengikuti ujian Dinas dan Ujian Penyusaian ijazah	√						T
	37	Jumlah ASN yang mengikuti Tugas belajar dan Izin Belajar	√			√			T
	38	Jumlah ASN yang berkembang dalam jabatan Fungsional	√						T
	39	Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH				√			T
	40	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada				√			T
<b>INSPEKTORAT</b>									
<b>1</b>	<b>Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan</b>								
	1	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	√						T
	2	Kapabilitas APIP							T
	3	Audit BumDes	√						T
	4	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	√						T
	5	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√						T
	6	Jumlah rekomendasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	√						B
	7	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	√						T
	8	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	√						T
	9	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa	√						T
	10	Jumlah Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	√						T
	11	Jumlah Obyek Reviu atas data dan dokumen penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)						√	B
	12	Jumlah Obyek Audit Keuangan dan Aset						√	B
	13	Jumlah Obyek Evaluasi LAKIP						√	B
	14	Jumlah Obyek Evaluasi Reformasi Birokrasi						√	B
	15	Jumlah Obyek Evaluasi Maturitas SPIP						√	B
<b>2</b>	<b>Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>								
	16	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	√					√	T
	17	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√					√	T
	18	Jumlah Monitoring Vaksin	√					√	B
	19	Jumlah Obyek yang diaudit Opname Kas dan Persediaan	√					√	B
	20	Jumlah Obyek Reviu atas pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)	√					√	B
	21	Jumlah Objek yang diaudit Kinerja	√					√	B
	22	Jumlah Objek yang diaudit Ketaatan	√					√	B
	23	Jumlah Objek Audit Pendapatan	√					√	B
	24	Jumlah Objek Probitas Audit	√					√	B
<b>3</b>	<b>Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan</b>								
	25	Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten	√						T

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)	
26	Jadwal Obyek Reviu atas dana alokasi khusus (DAK)	√						B
27	Reviu SSH, ASB, dan HSPK	√						T
28	Reviu Penanganan Dampak Inflasi	√						B
29	Reviu Laporan Keuangan Kabupaten	√						B
30	Reviu RKA Pokok OPD	√						T
31	Reviu RKPD Perubahan	√						T
32	Reviu RKA Perubahan OPD	√						T
33	Reviu KUA PPAS	√						T
34	Reviu UKPBJ	√						T
35	Reviu P3DN	√						T
36	Reviu HPS bersama UKPBJ	√						T
37	Reviu Renja OPD	√						T
38	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√					√	T
39	Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	√						T
40	Jumlah Obyek Reviu atas dokumen rancangan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD)	√						B
41	Jumlah Obyek Evaluasi Penyerapan Anggaran	√						B
<b>4</b>	<b>Inspektur Pembantu Bidang Investigasi</b>							
42	Pemeriksaan/Audit Investigasi	√						B
43	Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	√					√	B
44	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai	√						B
45	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Bidang Pencegahan Korupsi	√						B
46	Penanganan Pengaduan yang berindikasi terjadi Kerugian Keuangan Negara	√						B
47	Pemberian keterangan ahli di persidangan	√					√	T
48	Telaah sejawad	√						T
49	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	√						T
50	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara	√						T
51	Jumlah Obyek Pengawasan Khusus (Tergantung Pengaduan)	√					√	B
52	Pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi	√						B
53	Saber Pungli	√						B
54	Jumlah Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	√						T
55	Jumlah kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan	√					√	T
56	Jumlah aparaturnya yang telah menandatangani fakta integritas	√						T
57	Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	√						T
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>								
<b>1</b>	<b>Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</b>							
1	Indeks wawasan kebangsaan masyarakat (Makro)	√						T
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	√						T
3	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	√						T
4	Jumlah kebijakan teknis	√						T
5	Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan	√						T
6	Jumlah Forum Kerukunan Ummat beragama	√						T
7	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Wawasan Kebangsaan	√						T
8	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian						√	B

No.	Daftar Data*)	Sumber Indikator Data						Periode Terbit Data	
		RPJMD	LPPD	SDGs	SIPD	RKPD	GDPK (Grand Design Pemb. Kependudukan)		Usulan OPD
9	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Kegiatan							√	B
10	Jumlah Peningkatan Toleransi Intra dan Antar Ummat Beragama	√							T
11	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Minuman Keras	√							T
12	Jumlah Kasus Narkoba							√	B/Tr
13	Jumlah Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkoba							√	Tr
14	Indeks pemahaman politik masyarakat	√							T
15	Jumlah Pemuda pengibar bendera merah putih							√	
2	<b>Bidang Politik Dalam Negeri</b>								
16	Jumlah Kebijakan Teknis	√							T
17	Jumlah partai politik yang menerima bantuan keuangan parpol sesuai standar prosedur berlaku	√							T
18	Jumlah Laporan pemantauan perkembangan politik di daerah yang lengkap dan akurat	√							T
19	Jumlah Partai Politik							√	T
20	Jumlah Pemilih							√	T
21	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik							√	T
22	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi/Verifikasi Tata Kelola Bantuan Keuangan Parpol	√							T
23	Jumlah Bantuan Keuangan partai Politik	√							T
24	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan Politik							√	T
3	<b>Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional</b>								
25	Persentase potensi konflik yang tertangani	√							T
26	Persentase LSM aktif				√				T
27	Jumlah kebijakan teknis	√							T
28	Jumlah Ormas yang diawasi	√							Tr
29	Jumlah Ormas yang mengikuti Sosialisasi	√							T
30	Jumlah Yayasan Yang Terdaftar							√	T
31	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Terdaftar							√	T
32	Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)							√	T
33	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)							√	T
34	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)							√	T
35	Jumlah Konflik Sosial yang tertangani	√							Tr
36	Jumlah Forum Kordinasi Pimpinan Daerah	√							T
37	Jumlah Peserta Sosialisasi Character Building	√							T
38	Jumlah Potensi Konflik yang terdeteksi	√							T
39	Jumlah Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap dan Pemegang Izin Tinggal Terbatas							√	T
40	Jumlah Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Sosial							√	T



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Maret 2024



**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**